

**PRODUK DOMESTIK BRUTO INDONESIA  
MENURUT PENGGUNAAN  
TAHUN 2002—2007**

<https://www.bps.go.id>

PRODUK DOMESTIK BRUTO INDONESIA  
MENURUT PENGGUNAAN  
TAHUN 2002—2007

ISBN :  
Katalog BPS :  
Kode Publikasi : 06240.0502  
Ukuran Buku : 28 x 21 cm  
Jumlah Halaman: 90 halaman

Naskah Oleh:  
Subdirektorat Konsolidasi Neraca Pengeluaran

Gambar Kulit:  
Subdirektorat Konsolidasi Neraca Pengeluaran

Diterbitkan Oleh:  
Badan Pusat Statistik

Dicetak Oleh:

Boleh mengutip dengan menyebutkan sumber.

## KATA PENGANTAR

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan perangkat data ekonomi makro yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja atau performa hasil-hasil pembangunan, khususnya di bidang ekonomi makro. Perangkat ini digunakan oleh berbagai pihak untuk kepentingan serta tujuan yang berbeda-beda; bahkan lebih jauh data PDB digunakan sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi makro dimana diantaranya juga untuk penyusunan formulasi kebijakan, tingkat peredaran uang, dasar penetapan pajak, kajian ekspor dan impor serta analisis lain yang dapat didukung oleh data PDB.

Sampai saat ini penghitungan data PDB di Indonesia selalu dilakukan melalui dua pendekatan, sisi lapangan usaha (industri) dan sisi penggunaan (permintaan akhir), baik untuk periode tahunan maupun triwulanan. Pendekatan *pertama* menjelaskan tentang agregat PDB yang berkaitan dengan penciptaan nilai tambah atau lebih dikenal sebagai balas jasa faktor produksi yang dihasilkan oleh berbagai sektor lapangan usaha/industri. Sebagian besar nilai tambah tersebut merupakan sumber pendapatan bagi masyarakat dalam bentuk upah dan gaji, pendapatan kapital, serta pendapatan atas pemilikan faktor produksi lainnya.

Pendekatan *kedua* lebih menjelaskan tentang penggunaan atas pendapatan tersebut untuk membeli berbagai produk yang digunakan sebagai konsumsi akhir dan investasi “riil” (aspek moneter). Pendekatan ini dapat juga diartikan sebagai bagian dari produk yang tersedia di wilayah domestik yang digunakan sebagai konsumsi akhir masyarakat. Publikasi “*Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Penggunaan*” ini menyajikan data serta informasi tentang pendekatan kedua tersebut, mulai dari tahun 2002 sampai dengan 2007, dalam pola tahunan yang didasarkan pada serial harga konstan 2000. Data pada tahun 2006 dan 2007 masih bersifat sementara.

BPS sebagai instansi resmi yang melakukan penghitungan data PDB selama ini terus berupaya untuk meningkatkan kualitas data PDB. Kami mengucapkan banyak terima kasih pada berbagai pihak yang telah mendukung tersusunnya publikasi PDB menurut penggunaan ini, semoga publikasi ini banyak memberikan manfaat. Saran dan kritik sangat diharapkan agar publikasi PDB menurut penggunaan disajikan dengan lebih baik pada masa yang akan datang.

Jakarta, Desember 2008  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

DR. RUSMAN HERIAWAN  
NIP: 340003999

## DAFTAR ISI

	halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	v
Daftar Grafik .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II TINJAUAN AGREGAT PDB INDONESIA MENURUT PENGGUNAAN TAHUN 2002—2007 .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB III PERKEMBANGAN RINCIAN KOMPONEN-KOMPONEN PDB MENURUT PENGGUNAAN TAHUN 2002—2007 .....</b>	<b>15</b>
3.1. Konsumsi Rumah Tangga.....	15
3.2. Konsumsi Akhir Pemerintah .....	20
3.3. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) .....	26
3.4. Perubahan Inventori.....	30
3.5. Ekspor.....	32
3.6. Impor.....	35
<b>BAB IV AGREGAT PDB MENURUT PENGGUNAAN DAN PENDAPATAN NASIONAL INDONESIA TAHUN 2002—2007.....</b>	<b>39</b>
4.1. PDB (Nominal) .....	39
4.2. Pendapatan Nasional dan Pendapatan Disposabel Nasional .....	41
4.3. Average Propensity to Consume & Average Propensity to Save ...	46
4.4. Perbandingan Penggunaan PDB untuk Kons. Akhir Rumah Tangga Terhadap Ekspor.....	47
4.5. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) .....	48

4.6.	Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDB .....	49
4.7.	Perbandingan Ekspor terhadap PMTB.....	50
4.8.	Perbandingan PDB terhadap Impor .....	51
4.9.	Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan .....	51
4.10.	Neraca Perdagangan (Trade Balance) .....	53
4.11.	Rasio Perdagangan Internasional (RPI).....	54
4.12.	Nilai Tukar Perdagangan Luar Negeri.....	56
4.13.	Rasio Pendapatan Nasional (PN) terhadap PDB.....	57
4.14.	Incremental Capital Output Ratio (ICOR) .....	58
<b>BAB V</b>	<b>METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA .....</b>	<b>61</b>
5.1.	Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga .....	63
5.2.	Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah.....	66
5.3.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) .....	69
5.4.	Perubahan Inventori.....	72
5.5.	Ekspor dan Impor Barang serta Jasa.....	75
5.6.	Penyusutan (Depresiasi).....	77
5.7.	Pajak Tidak Langsung (neto) .....	78
5.8.	Pendapatan atas Faktor Produksi dari Luar Negeri .....	79
5.9.	Transfer Berjalan (Current Transfer) .....	80
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
	<b>DAFTAR ISTILAH PENTING .....</b>	<b>85</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>89</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>halaman</b>
Tabel 1. Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2002—2007.....	7
Tabel 2. Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2000) Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2002—2007.....	9
Tabel 3. Distribusi Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Komponen Tahun 2002—2007.....	11
Tabel 4. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2000) Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2002—2007 .....	12
Tabel 5. Indeks Implisit Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2002—2007.....	14
Tabel 6. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Tahun 2002—2007 .....	16
Tabel 7. Struktur dan Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Tahun 2002—2007.....	18
Tabel 8. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Tahun 2002—2007 .....	21
Tabel 9. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Indonesia Tahun 2002—2007 .....	23

Tabel 10.	Perkembangan dan Struktur Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Indonesia Tahun 2002—2007 .....	29
Tabel 11	Perkemb. dan Struktur Perub. Inventori Tahun 2002—2007 .....	31
Tabel 12	Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Tahun 2002—2007 .....	33
Tabel 13	Perkembangan Impor Barang dan Jasa Tahun 2002—2007 .....	36
Tabel 14.	PDB dan PDB perkapita Tahun 2002—2007 .....	40
Tabel 15.	PDB, Pendapatan Nasional dan Pendapatan Disposabel Nasional Perkapita Tahun 2002—2007 .....	43
Tabel 16.	Average Propensity to Consume dan Average Propensity to Save Tahun 2002—2007 .....	47
Tabel 17.	Perbandingan PDB Penggunaan untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap Ekspor Tahun 2002—2007 .....	47
Tabel 18.	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2002—2007 .....	48
Tabel 19.	Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDB Tahun 2002—2007 .....	49
Tabel 20.	Perbandingan Ekspor terhadap PMTB Atas Dasar Harag Berlaku (ADHB) 2002—2007 .....	50

Tabel 21.	Rasio PDB terhadap Impor Tahun 2002—2007 .....	51
Tabel 22.	Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Tahun 2002—2007 .....	52
Tabel 23.	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Tahun Tahun 2002—2007 .....	54
Tabel 24.	Rasio Perdagangan Internasional Tahun 2002—2007 .....	55
Tabel 25.	Nilai Tukar Perdagangan Luar Negeri Tahun Tahun 2002—2007 .....	56
Tabel 26.	Rasio Pendapatan Nasional dan Pendapatan Disposabel terhadap PDB Tahun 2002—2007 .....	57
Tabel 27.	Incremental Capital Output Ratio Tahun 2002—2007 .....	59

## DAFTAR GRAFIK

	<b>halaman</b>
Grafik 1. Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2002—2007 .....	8
Grafik 2. Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 2000 (ADHK2000) Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2002—2007 .....	9
Grafik 3. Perbandingan Produk Domestik Bruto Indonesia ADHB dan ADHK2000 Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2002—2007 .....	10
Grafik 4. Distribusi Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2002—2007 .....	11
Grafik 5. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2000) Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2002—2007 .....	13

## BAB I PENDAHULUAN

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi makro disamping perangkat ekonomi makro lainnya seperti Tabel Input-Output (I-O), Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan Neraca Arus Dana (NAD). PDB merupakan ukuran dasar (*basic measure*) atas penggunaan produk (*output*) yang tercipta dari suatu proses ekonomi. Dalam konteks ini secara umum ukuran tersebut menjelaskan tentang kegiatan dan hasil akhir dari proses produksi dalam satu wilayah (negara). Berbagai data agregat yang dapat diturunkan diantaranya permintaan konsumsi akhir, pembentukan modal tetap (investasi fisik), ekspor dan impor, Berbagai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan tersebut ditujukan untuk memenuhi permintaan akhir berbagai pelaku ekonomi domestik maupun luar negeri.

Pengukuran PDB melalui pendekatan penggunaan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengukuran PDB menurut pendekatan lapangan usaha (sektor), yang disajikan dalam satu kerangka kerja. Meskipun demikian, penghitungan PDB menurut penggunaan dilakukan secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDB menurut lapangan usaha lebih menjelaskan tentang proses produksi serta faktor pendapatan yang diturunkan (balas jasa faktor produksi)<sup>1</sup>, sedangkan PDB penggunaan menjelaskan tentang penggunaan atas pendapatan tersebut. Selain itu, melalui komponen penggunaan atau permintaan akhir (*final demand*) atau dalam istilah lain disebut sebagai PDB menurut pengeluaran, juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa domestik (*supply side*). Melalui hubungan ini lebih mudah dilihat titik keseimbangan makro antara sisi “penyediaan dan permintaan”.

Secara konsep dijelaskan bahwa<sup>2</sup> tujuan penyusunan PDB dari sisi yang berbeda

---

1 Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

2 *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

tersebut dimaksudkan untuk i) memastikan konsistensi serta kelengkapan di dalam membuat perkiraan/estimasi ii) dapat memberi manfaat lebih dalam analisis PDB dan iii) kontrol atas kelayakan estimasi. Meskipun secara konsep keduanya mempunyai nilai yang sama besar (*equivalent*), tetapi karena perbedaan dalam penggunaan pendekatan estimasi maupun metode pengukuran, menyebabkan terjadinya diskrepansi.

Dengan demikian maka PDB sisi penggunaan (*expenditure*) ini menjelaskan tentang besaran nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik (*output*) untuk digunakan sebagai konsumsi “akhir” masyarakat. Secara spesifik yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan produk baik berupa barang maupun jasa yang tujuannya tidak untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis), yang direalisasikan dalam bentuk konsumsi akhir rumah tangga (termasuk lembaga-lembaga nirlaba yang melayani rumah tangga), konsumsi akhir pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), perubahan inventori serta ekspor.

Di sisi lain, dalam menghasilkan berbagai produk barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, tidaklah terlepas dari ketergantungan terhadap produk yang berasal dari negara lain (impor). Berbagai produk barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya masih terkandung produk impor, maka untuk mengukur besaran nilai tambah domestik (PDB) komponen impor harus dikeluarkan atau dikurangkan dari perhitungan konsumsi/permintaan akhir. Tingginya permintaan yang tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik menjadi peluang masuknya produk-produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa perdagangan berbagai produk impor terus berkembang dari waktu ke waktu, baik secara kuantitas maupun nilai.

Secara konsep seharusnya PDB sisi lapangan usaha (Y) mempunyai total nilai yang sama besar dengan PDB dari sisi penggunaan (E), tetapi dalam kenyataannya tidaklah

demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisinya, pendekatan pengukuran antara kedua pendekatan PDB tersebut juga berbeda. Dalam sistem penyajiannya faktor perbedaan tersebut diletakkan pada sisi PDB penggunaan yang kemudian disebut sebagai perbedaan statistik (*statistical discrepancy*). Unsur–unsur yang menyebabkan terjadinya perbedaan tersebut di antaranya adalah basis dan konsep pengukuran, metode pendekatan, lingkup ukuran serta sumber data. Adanya perbedaan tersebut diharapkan tidak menjadi kendala bagi para pengguna data PDB.

Penghitungan PDB dari sisi “**penggunaan**” ini dimaksudkan juga untuk menjelaskan tentang bagaimana “pendapatan” (Y) yang diciptakan melalui berbagai ragam proses ekonomi sektor produksi (lapangan usaha) menjadi sumber pendapatan masyarakat<sup>3</sup> yang pada gilirannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhirnya. Atau pada sisi yang berbeda PDB menurut penggunaan ini juga menjelaskan tentang penggunaan sebagian besar produk domestik untuk keperluan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut juga sebagai “**output akhir (*final output*)**”. Hubungan antara sisi pendapatan serta sisi pengeluaran atas pembelian berbagai produk barang dan jasa, baik yang berasal dari produksi domestik maupun impor (termasuk yang diekspor) merupakan bentuk analisis sederhana PDB ditinjau dari kedua pendekatan tersebut. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDB secara simultan tersebut dapat ditunjukkan melalui model Keynesian dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (income)

= PDB (lapangan usaha)

---

3. - Yang dimaksud adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga-lembaga nirlaba yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik  
- Disebut sebagai pendekatan “riil”  
- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

C (consumption)	=	Konsumsi akhir
GFCF (Gross Fixed Capital Formation)	=	Pembentukan Modal Tetap Bruto
$\Delta$ Inventori	=	Perubahan Inventori
X	=	Ekspor
M	=	Impor

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa pendapatan atau nilai tambah yang diturunkan dari penghitungan PDB menurut lapangan usaha “identik” dengan PDB menurut penggunaan. Apabila  $Y$  adalah pendapatan dan  $C$  menggambarkan konsumsi akhir, kemudian GFCF serta  $\Delta$  Inventori menggambarkan investasi (fisik) maka selisih ekspor dikurangi dengan impor mengekspresikan surplus atau defisit yang berasal dari perdagangan berbagai produk barang dan jasa dengan luar negeri. Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatannya, apakah hanya untuk tujuan konsumsi akhir atau juga untuk investasi (khususnya fisik). Selain itu juga dapat diketahui seberapa besar ketergantungan ekonomi domestik (wilayah) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan barang dan jasa (*external transaction*). Selisih antara ekspor dengan impor disebut sebagai “ekspor neto” yang juga memberikan gambaran tentang tabungan luar negeri.

Sama halnya dengan pendekatan lapangan usaha, PDB sisi permintaan atau penggunaan akhir ini juga menurunkan agregat-agregat ekonomi makro seperti halnya nilai nominal, struktur/komposisi atau distribusi penggunaan akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit masing-masing komponen maupun keseluruhan PDB ( $E$ ). Selain menurut masing-masing komponen penggunaan, pada publikasi ini juga disajikan beberapa data agregat makro lain yang berkaitan erat dengan PDB, di antaranya Pendapatan Nasional (*National Income*). Angka Pendapatan Nasional ini merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat dalam suatu negara. Selain itu disajikan

juga data perkapita, untuk melihat ukuran pemerataan, baik rata-rata tingkat produktivitas maupun tingkat kemakmuran masyarakat, secara individu.

Untuk melihat perkembangan atau pertumbuhan PDB sisi penggunaan dari waktu ke waktu, disajikan pula data runtun waktu (*time series*) dalam bentuk angka indeks (baik indeks berantai maupun indeks perkembangan) untuk masing-masing komponen penggunaan akhir, berikut dengan data agregat turunannya. Indeks berantai bermanfaat untuk melihat perubahan volume maupun harga antar dua titik waktu yang berurutan sedangkan indeks perkembangan untuk melihat perubahan volume maupun harga secara kumulatif dalam satu periode tertentu. Indikator tersebut diturunkan dari hasil perhitungan PDB atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK) 2000, dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 baik triwulanan maupun tahunan.

<https://www.bps.go.id>

<https://www.bps.go.id>

*Halaman ini dibiarkan kosong*

## BAB II TINJAUAN AGREGAT PDB INDONESIA MENURUT PENGGUNAAN TAHUN 2002—2007

Proses pembangunan ekonomi Indonesia telah menunjukkan pemulihan setelah berlalunya masa krisis. Indikasi ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya nilai PDB baik secara nominal maupun riil, yang ditunjang oleh pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi digambarkan oleh pertumbuhan pada sektor-sektor produksi (*supply side*), serta pertumbuhan pada komponen permintaan akhir (*demand side*). Jika pada sisi produksi pertumbuhan banyak didominasi oleh pertumbuhan sektor transpor dan komunikasi, sedangkan pada sisi penggunaan pertumbuhan lebih diwarnai oleh pertumbuhan investasi fisik (PMTB). Kegiatan ekspor dan impor (yang cenderung semakin membesar), juga mempunyai peran yang tidak kalah penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

**Tabel 1. Produk Domestik Bruto Indonesia ADHB Menurut Komponen Penggunaan  
Tahun 2002—2007**

*(Milyar Rp)*

Uraian	2002	2003	2004	2005	2006 *	2007 **
1. Konsumsi Rumah Tangga	1.231.964,5	1.372.078,0	1.532.888,3	1.785.596,4	2.092.655,7	2.511.308,2
2. Konsumsi Pemerintah	132.218,8	163.701,4	191.055,6	224.980,5	288.079,9	329.760,1
3. PMTB	353.967,0	392.788,6	515.381,2	655.854,3	805.470,3	983.830,9
4. Perubahan Inventori	35.979,5	122.681,9	36.911,1	39.974,6	42.382,2	169,7
5. Ekspor	595.514,0	613.720,8	739.639,3	945.121,8	1.036.316,5	1.161.956,4
6. Impor	480.815,4	465.940,9	632.376,1	830.083,4	855.587,8	1.002.507,0
Total PDB	1.821.833,4	2.013.674,6	2.295.826,2	2.774.281,1	3.339.479,6	3.957.403,9
Diskrepansi Statistik <sup>4</sup>	-46.995,0	-185.355,1	-87.673,3	-47.163,0	-69.837,1	-27.114,5

Keterangan : \* sementara \*\* sangat sementara

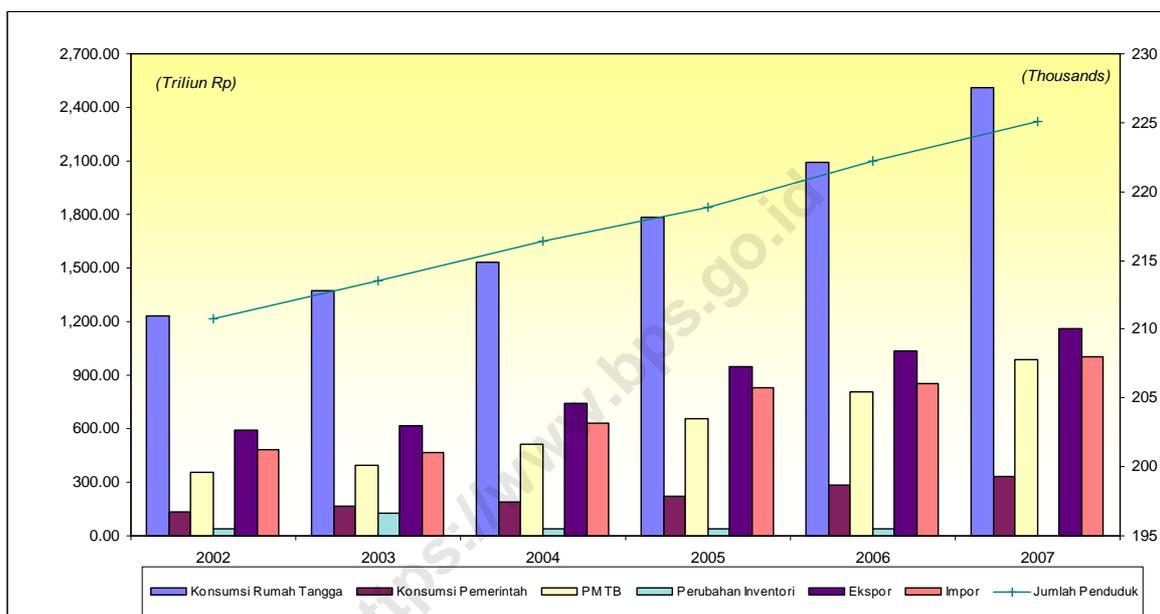
Total nilai nominal PDB Indonesia (ADHB) setiap tahun antara tahun 2002 sampai dengan 2007 menunjukkan adanya peningkatan secara signifikan berturut-turut<sup>5</sup> sebesar 1.821.833,4 miliar (2002); 2.013.674,6 miliar (2003); 2.295.826,2 miliar (2004); 2.774.281,1 miliar

<sup>4</sup> Perbedaan antara total PDB Lapangan Usaha dan PDB Penggunaan

<sup>5</sup> Sesuai dengan total PDB menurut lapangan usaha (sektoral)

rupiah (2005); 3.339.479,6 miliar rupiah (2006); bahkan mencapai 3.957.403,9 miliar rupiah (2007). Peningkatan PDB dari sisi nilai tambah tersebut tentu diikuti pula oleh peningkatan pada sisi permintaan akhir atau penggunaan PDB (*demand side*) yang akan dijelaskan lebih jauh dalam publikasi ini.

**Grafik 1. Produk Domestik Bruto Indonesia ADHB Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2002—2007**



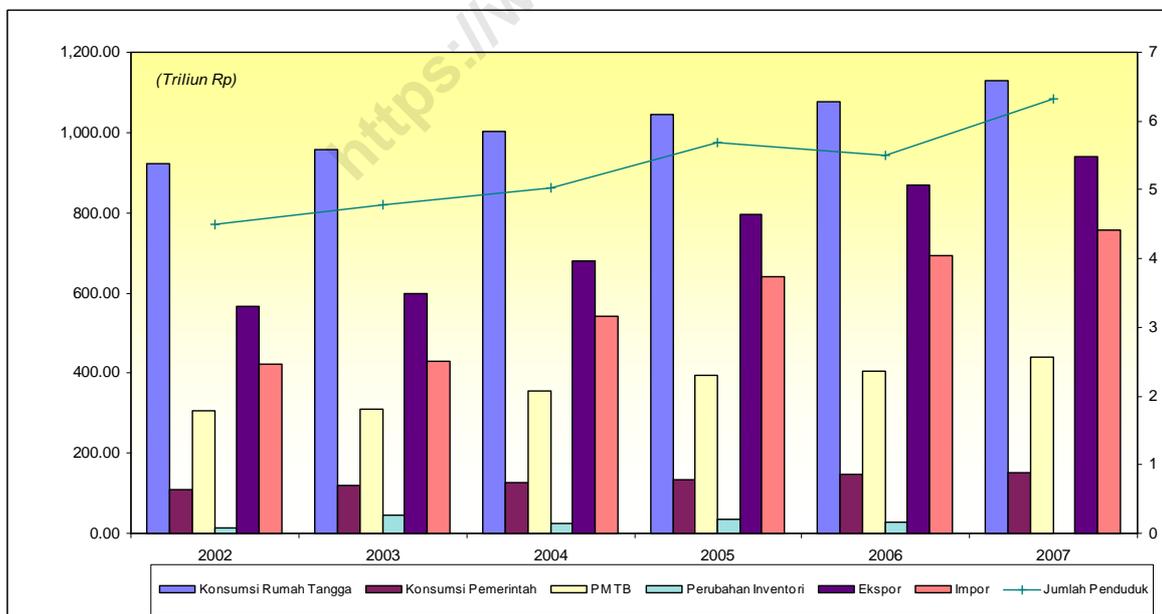
Selain dinilai atas dasar harga berlaku (ADHB), PDB menurut komponen penggunaan juga dinilai atas dasar harga konstan (ADHK) 2000 atau berbagai produk yang dinilai menurut harga pada tahun 2000. Melalui pendekatan tersebut nilai PDB yang dihitung untuk masing-masing tahun sebenarnya dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa adanya pengaruh harga). Selama kurun waktu 2002—2007 PDB menurut komponen penggunaan (ADHK) menggambarkan adanya perubahan ataupun pertumbuhan ekonomi secara riil, yang utamanya berkaitan dengan peningkatan dalam konsumsi akhir, dengan gambaran sebagai berikut:

**Tabel 2. Produk Domestik Bruto Indonesia ADHK 2000 Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2002—2007**

Uraian	2002	2003	2004	2005	2006 *	2007 **
1. Konsumsi Rumah Tangga	920.749,6	956.593,4	1.004.109,0	1.043.805,1	1.076.928,1	1.131.186,7
2. Konsumsi Pemerintah	110.333,6	121.404,1	126.248,7	134.625,6	147.563,7	152.184,6
3. PMTB	307.584,6	309.431,1	354.865,7	393.500,5	403.161,9	440.078,2
4. Perubahan Inventori	13.085,0	45.996,7	25.099,1	33.508,3	29.026,8	911,9
5. Ekspor	566.188,4	599.516,4	680.621,0	793.613,0	868.256,5	937.849,2
6. Impor	422.271,4	428.874,6	543.183,8	639.701,9	694.605,3	756.348,3
Total PDB	1.505.216,4	1.577.171,3	1.656.516,8	1.750.815,2	1.847.292,9	1.963.974,3
Diskrepansi Statistik	9.546,6	-26.895,8	8.757,2	-8.535,4	16.961,3	58.111,9

Keterangan : \* sementara \*\* sangat sementara

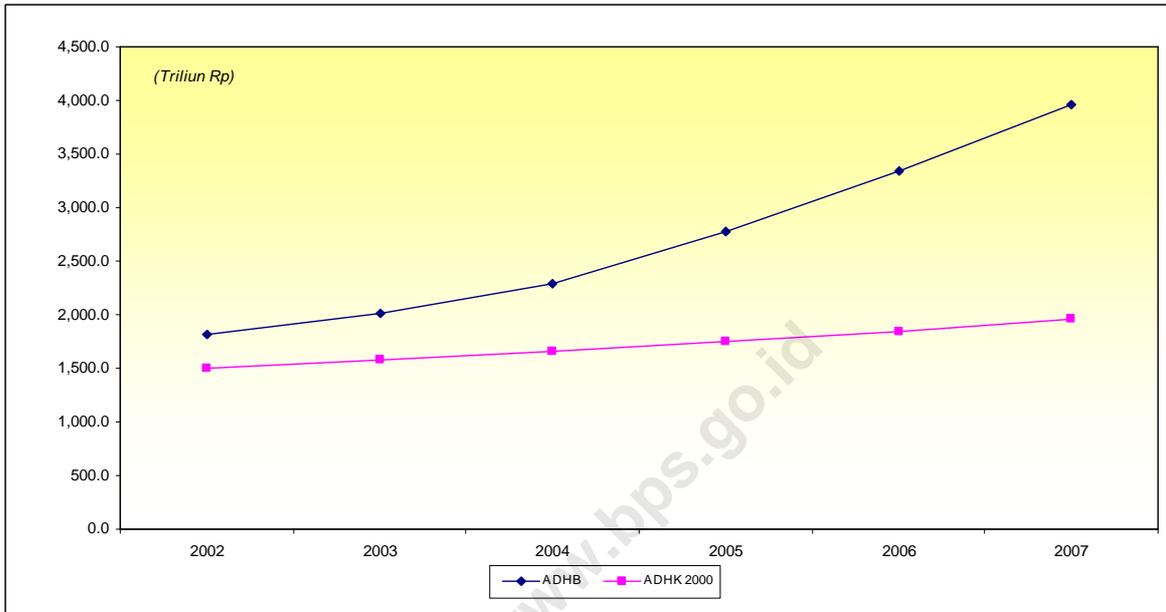
**Grafik 2. Produk Domestik Bruto Indonesia ADHK 2000 Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2002—2007**



Sekilas nampak bahwa pada umumnya nilai PDB (ADHB) selalu lebih tinggi daripada nilai PDB (ADHK) pada masing-masing tahun yang bersamaan. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya pengaruh perubahan harga pada perhitungan PDB (ADHB), sedangkan pada PDB

(ADHK) faktor harga sudah tidak ada pengaruhnya. Sama halnya dengan PDB (ADHB), seluruh komponen penggunaan akhir PDB (ADHK) menunjukkan peningkatan.

**Grafik 3. Perbandingan Produk Domestik Bruto Indonesia ADHB dan ADHK 2000 Menurut Penggunaan Tahun 2002—2007**



Terbentuknya nilai PDB secara keseluruhan merupakan kontribusi dari komponen-komponen penggunaan seperti, konsumsi akhir rumah tangga (KRT), konsumsi akhir pemerintah (KP), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor serta impor. Terlihat bahwa sebagian besar produk yang dikonsumsi di wilayah domestik masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (di atas 60 persen). Ekspor juga mempunyai peran yang relatif besar, yakni sekitar 29 sampai 34 persen produk Indonesia mampu menembus pasar internasional; sebaliknya impor juga mempunyai peran yang juga relatif besar, yakni sekitar 23 sampai 29 persen permintaan domestik masih menggunakan produk dari impor. Di sisi lain pengeluaran untuk modal (PMTB) juga mempunyai peran relatif tinggi dengan kontribusi sekitar 19 sampai 25 persen (2002—2007).

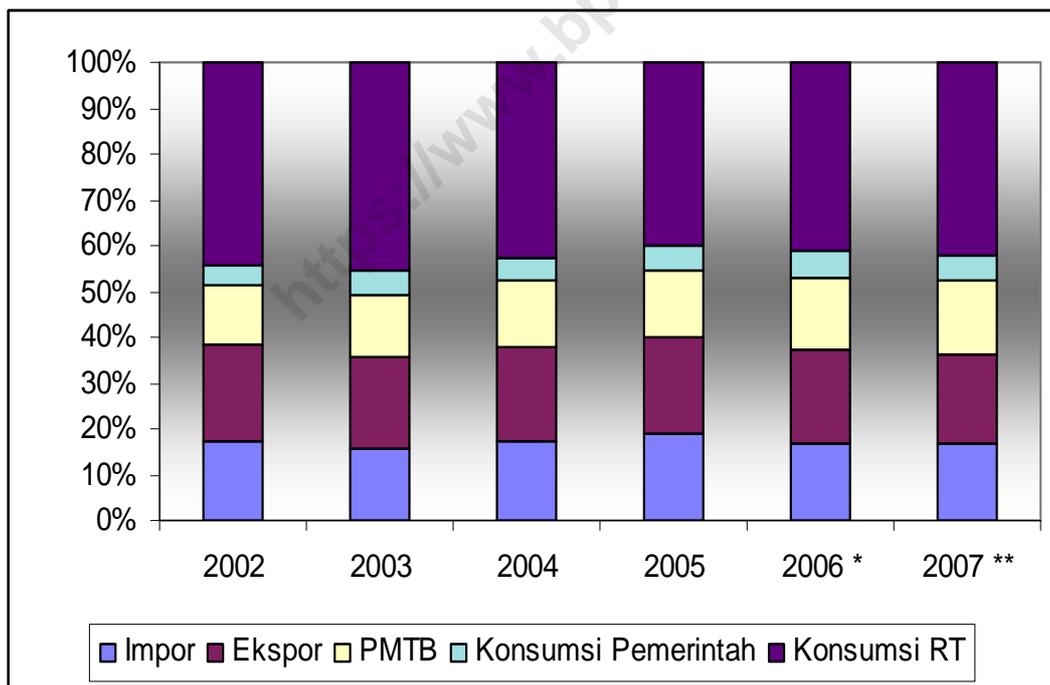
**Tabel 3. Distribusi Produk Domestik Bruto Indonesia ADHB Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2002—2007**

(persen)

Uraian	2002	2003	2004	2005	2006 *	2007 **
1. Konsumsi Rumah Tangga	67,62	68,14	66,77	64,36	62,66	63,46
2. Konsumsi Pemerintah	7,26	8,13	8,32	8,11	8,63	8,33
3. PMTB	19,43	19,51	22,45	23,64	24,12	24,86
4. Perubahan Inventori	1,97	6,09	1,61	1,44	1,27	0,00
5. Ekspor	32,69	30,48	32,22	34,07	31,03	29,36
6. Impor	26,39	23,14	27,54	29,92	25,62	25,33
Total PDB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Diskrepansi Statistik	-2,58	-9,20	-3,82	-1,70	-2,09	-0,69

Keterangan : \* sementara \*\* sangat sementara

**Grafik 4. Distribusi Produk Domestik Bruto Indonesia ADHB Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2002—2007**



Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang data 7,26-8,63 persen, yang menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam penyerapan produk domestik tidak terlalu besar, bahkan dengan rasio perbandingan yang cukup berfluktuasi. Kemudian perdagangan eksternal

Indonesia yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor menunjukkan bahwa nilai ekspor secara nominal cenderung lebih tinggi daripada nilai impor. Tren perdagangan internasional Indonesia dalam kurun waktu tersebut selalu menunjukkan dalam posisi “surplus” atau menguntungkan. Tepatnya posisi surplus terjadi pada perdagangan produk barang, sementara perdagangan jasa (*trade in services*) masih dalam kondisi merugi atau “defisit”.

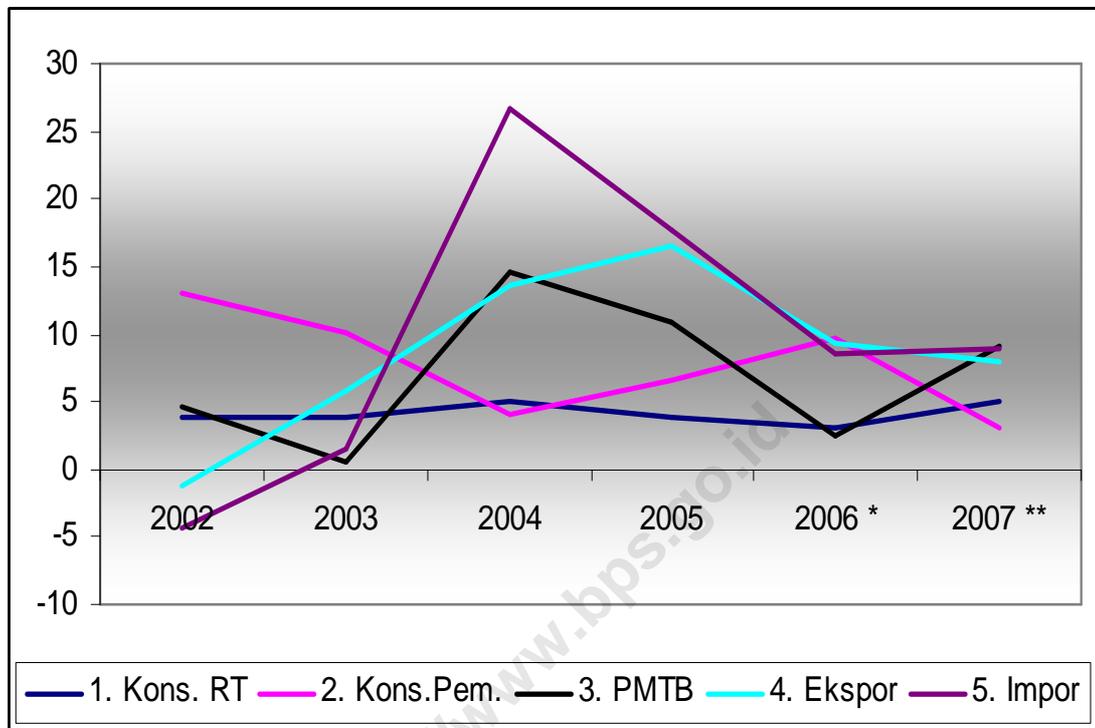
**Tabel 4. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia ADHK2000 Menurut  
Komponen Penggunaan Tahun 2002—2007**

Uraian	(persen)					
	2002	2003	2004	2005	2006 *	2007 **
1. Konsumsi Rumah Tangga	3,84	3,89	4,97	3,95	3,17	5,04
2. Konsumsi Pemerintah	12,99	10,03	3,99	6,64	9,61	3,13
3. PMTB	4,69	0,60	14,68	10,89	2,46	9,16
4. Ekspor	-1,22	5,89	13,53	16,60	9,41	8,02
5. Impor	-4,25	1,56	26,65	17,77	8,58	8,89
Total PDB	4,50	4,78	5,03	5,69	5,51	6,32

Keterangan : \* sementara \*\* sangat sementara

Agregat makro lain yang dapat diturunkan adalah pertumbuhan riil PDB yang dikenal sebagai pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2002 sampai dengan 2007 secara rata-rata mampu mencapai 5,31 persen dengan masing-masing sebesar 4,78 persen (2003); 5,03 persen (2004); 5,69 persen (2005); 5,51 persen (2006) dan 6,32 pada tahun 2007. Pertumbuhan yang tertinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 6,32 persen, sebaliknya yang terendah terjadi pada tahun 2002 (4,50 persen).

**Grafik 5. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia ADHK2000 Menurut  
Komponen Penggunaan Tahun 2002—2007**



Sementara itu, indeks implisit<sup>5</sup> PDB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik itu konsumen akhir seperti rumah tangga, lembaga nirlaba (LNPR) maupun pemerintah, serta konsumen lainnya (sektor bisnis dan luar negeri) juga menunjukkan peningkatan. Kumulatif kenaikan harga total PDB yang terjadi antara tahun 2002 sampai dengan 2007 adalah sebesar 101 persen, atau secara rata-rata naik sekitar 14,5 persen setiap tahunnya. Kenaikan harga yang terjadi di antaranya (inflasi) juga dipicu oleh adanya kebijakan kenaikan harga BBM yang pada gilirannya juga berdampak terhadap kenaikan harga pada seluruh komoditas atau produk yang dikonsumsi masyarakat. Faktor kenaikan harga inilah yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat.

5 Indeks perkembangan

**Tabel 5. Indeks Implisit Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Komponen  
Penggunaan Tahun 2002—2007**

*(persen)*

Uraian	2002	2003	2004	2005	2006 *	2007 **
1. Konsumsi Rumah Tangga	133,8	143,4	152,7	171,1	194,3	222,0
2. Konsumsi Pemerintah	119,8	134,8	151,3	167,1	195,2	216,7
3. PMTB	115,1	126,9	145,2	166,7	199,8	223,6
4. Ekspor	105,2	102,4	108,7	119,1	119,4	123,9
5. Impor	113,9	108,6	116,4	129,8	123,2	132,5
Total PDB	121,0	127,7	138,6	158,5	180,8	201,5

Keterangan : \* sementara \*\* sangat sementara

### **BAB III**

## **PERKEMBANGAN RINCIAN KOMPONEN-KOMPONEN PDB MENURUT PENGGUNAAN TAHUN 2002—2007**

Perkembangan struktur ekonomi Indonesia akibat dari proses pembangunan ekonomi Indonesia yang terjadi selama kurun waktu tersebut tidaklah terlepas dari pertumbuhan maupun perubahan perilaku yang terjadi di masing-masing komponen penggunaan akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Data yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar produk barang dan jasa yang beredar di wilayah domestik Indonesia digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga (termasuk LNPRT - Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga) serta pemerintah, kemudian sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (PMTB dan perubahan inventori). Perilaku masing-masing komponen penggunaan tersebut akan dijelaskan berikut ini:

### **3.1. Konsumsi Akhir Rumah Tangga**

Konsumsi rumah tangga (termasuk LNPRT) merupakan segmen terbesar dalam penggunaan akhir berbagai produk barang dan jasa, baik berasal dari komoditas domestik maupun impor. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah (PDB Y) yang dihasilkan ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga, dengan kata lain bahwa sebagian besar dari produk domestik yang dihasilkan sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

Meskipun fungsi pokok rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*), tetapi di sini termasuk pula pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga khusus (seperti penjara dan asrama) serta LNPRT. Dengan demikian, pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga dalam pengukuran di sini termasuk pula pengeluaran-pengeluaran lembaga dimaksud. Selanjutnya, konsumsi akhir rumah tangga yang dimaksud di sini meliputi

berbagai jenis pengeluaran yang secara garis besar dibedakan menurut dua kelompok utama yaitu makanan dan non makanan. Penggolongan ini semata-mata didasarkan pada kebutuhan pokok rumah tangga yang berlaku secara umum.

Data berikut ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tersebut konsumsi akhir RT mengalami peningkatan secara signifikan baik dalam nominal (ADHB) maupun riil (ADHK), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun rumah tangga itu sendiri. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

**Tabel 6. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga  
Tahun 2002—2007**

Uraian	2002	2003	2004	2005	2006 *	2007 **
Total Konsumsi RT						
a. ADHB ( <i>Miliar Rp</i> )	1.231.964,5	1.372.078,0	1.532.888,3	1.785.596,4	2.092.655,7	2.511.308,2
b. ADHK 2000 ( <i>Miliar Rp</i> )	920.749,6	956.593,4	1.004.109,0	1.043.805,1	1.076.928,1	1.131.186,7
Proporsi terhadap PDB (% - ADHB)	67,62	68,14	66,77	64,36	62,66	63,46
Rata-rata konsumsi per-RT per-tahun ( <i>Ribu Rp</i> )						
a. ADHB	22.595,09	25.125,53	27.938,86	32.395,30	37.407,60	44.053,40
b. ADHK 2000	16.887,19	17.517,17	18.301,18	18.937,30	19.250,80	19.843,29
Rata-rata konsumsi per- kapita/tahun ( <i>Ribu Rp</i> )						
a. ADHB	5.846,00	6.425,08	7.084,19	8.158,30	9.418,25	11.156,88
b. ADHK 2000	4.369,20	4.479,47	4.640,45	4.769,09	4.846,85	5.025,47
Pertumbuhan <sup>7</sup>						
a. Total konsumsi RT	3,84	3,89	4,97	3,95	3,17	5,04
b. Per-RT	1,41	3,73	4,48	3,48	1,66	3,08
c. Perkapita	2,45	2,52	3,59	2,77	1,63	3,68
Jumlah RT ( <i>unit</i> )	54.523.540	54.608.908	54.865.817	55.119.000	55.942.000	57.006.000
Jumlah penduduk ( <i>000 org</i> )	210.736	213.551	216.382	218.869	222.192	225.091

Keterangan : \* sementara \*\* sangat sementara

Proporsi penggunaan produk domestik (PDB) untuk konsumsi akhir rumah tangga berada pada kisaran 60 persen. Pada periode 2002 sampai dengan 2007 proporsinya turun

<sup>7</sup> Diturunkan dari perhitungan PDB (atas dasar harga konstan/ADHK 2000)

naik (fluktuatif) mulai dari 68,14 persen pada titik tertinggi (2003) hingga mencapai 62,66 persen pada titik terendah (2006). Pada tahun 2007 terjadi kenaikan proporsi dari tahun sebelumnya sebagaimana terjadi pada tahun 2003.

Masa pemulihan ekonomi telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku serta kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa krisis. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis produk barang dan jasa di pasaran domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja konsumsi masyarakat, termasuk pula rumah tangga.

Dilihat secara umum, rata-rata konsumsi rumah tangga per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik untuk harga berlaku (ADHB) maupun harga konstan 2000 (ADHK). Pada tahun 2002, secara umum setiap rumah tangga di Indonesia menghabiskan dana sekitar 22.595,09 ribu rupiah untuk membiayai seluruh konsumsinya baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, papan, serta pengeluaran lainnya). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi 25.125,53 ribu (2003), kemudian menjadi sebesar 27.938,86 ribu (2004); 32.395,30 ribu (2005); 37.407,60 ribu (2006) dan menjadi 44.053,40 ribu rupiah (2007). Sementara itu, pada perkiraan harga konstan (2000) rata-rata konsumsi rumah tangga juga meningkat secara signifikan terutama pada tahun 2003 dan 2004 dengan peningkatan masing-masing sebesar 3,73 persen dan 4,48 persen.

Di sisi lain, rata-rata konsumsi perkapita juga menunjukkan gejala yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya. Pertumbuhan rata-rata konsumsi perkapita menunjukkan peningkatan baik atas harga berlaku maupun harga konstan 2000. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Indonesia meningkat baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Peningkatan rata-rata konsumsi perkapita secara “riil” berkisar antara 1,63 sampai 3,68 persen. Peningkatan ini secara otomatis akan berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga.

**Tabel 7. Struktur dan Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Tahun 2002—2007**

Uraian	2002	2003	2004	2005	2006 *	2007 **
Struktur Konsumsi Akhir RT <sup>8</sup>						
a. Makanan (Miliar Rp)	620.996,1	696.637,7	747.004,1	849.042,5	990.336,3	1.188.527,4
(%)	(50,41)	(50,77)	(48,73)	(47,55)	(47,32)	(47,33)
b. Bukan-makanan (Miliar Rp)	610.968,4	675.440,3	785.884,2	936.553,9	1.102.319,4	1.322.780,7
(%)	(49,59)	(49,23)	(51,27)	(52,45)	(52,68)	(52,67)
Total Konsumsi (Miliar Rp)	1.231.964,5	1.372.078,0	1.532.888,3	1.785.596,4	2.092.655,7	2.511.308,2
(%)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Indeks Perkembangan (ADHB) <sup>9</sup>						
a. Makanan	136,98	153,67	164,78	187,29	218,46	262,18
b. Bukan-makanan	151,43	167,41	194,78	232,13	273,21	327,85
Total Konsumsi	143,79	160,14	178,91	208,40	244,24	293,10
Pertumbuhan riil (ADHK)						
a. Makanan	1,60	2,00	1,67	2,40	2,12	4,19
b. Bukan-makanan	6,27	5,86	8,27	5,42	4,14	5,80
Total Konsumsi	3,84	3,89	4,97	3,95	3,17	5,04
Pertumbuhan implisit (indeks harga) <sup>10</sup>						
a. Makanan	14,02	9,98	5,47	11,00	14,22	14,22
b. Bukan-makanan	14,17	4,43	7,46	13,05	13,03	13,03
Total Konsumsi	14,12	7,20	6,43	12,06	13,59	13,59

Keterangan : \* sementara \*\* sangat sementara

Secara total pertumbuhan konsumsi rumah tangga (ADHK) meningkat dari 3.89 persen (tahun 2003) menjadi 4.97 persen (2004) tetapi kemudian menurun menjadi 3.95 persen (2005) dan selanjutnya 3.17 persen (2006). Namun demikian, pada tahun 2007 terjadi kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 5,04 persen. Sementara konsumsi perkapita juga meningkat dari sebesar 2,52 persen (2003) menjadi 3,59 persen (2004)

<sup>8</sup> Diturunkan dari perhitungan PDB (atas dasar harga berlaku /ADHB )

<sup>9</sup> Perbandingan terhadap tahun dasar (2000)

<sup>10</sup> Tingkat perubahan harga produk konsumsi

kemudian 2,77 persen (2005) dan turun sebesar 1,63 persen pada tahun 2006 dan 3,68 persen (2007). Nampak bahwa peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara “riil” lebih tinggi daripada peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berada di bawah 1,52 persen. Kondisi ini mengindikasikan terjadinya perubahan tingkat kemakmuran dalam masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh dalam perangkat data PDB ini.

Dari tahun 2002 sampai dengan 2007, secara rata-rata nampak bahwa struktur konsumsi akhir rumah tangga Indonesia masih didominasi oleh pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan akan pangan (makanan) dan selebihnya untuk memenuhi kebutuhan lainnya (bukan makanan). Proporsi pengeluaran untuk kebutuhan makanan cenderung menurun sebaliknya kebutuhan bukan makanan meningkat. Proporsi untuk makanan pada masing-masing tahun mencapai 50,41 persen (2002); 50,77 persen (2003); Kemudian porsi tersebut menurun menjadi 48,73 persen (2004) lalu menjadi 47,55 persen (2005), 47,32 persen (2006) dan 47,33 persen (2007). Kondisi ini juga dapat ditunjukkan melalui besaran angka indeks perkembangan di mana pengeluaran konsumsi untuk bukan makanan menunjukkan perubahan yang lebih besar dari pada pengeluaran untuk makanan.

Peralihan proporsi pola konsumsi ini menunjukkan adanya perubahan dalam perilaku konsumsi rumah tangga dari yang tadinya berorientasi pangan kepada kebutuhan lainnya. Pengeluaran untuk kebutuhan non pangan menjadi semakin penting akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya-biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

Dilihat dari pertumbuhan “riil” nya, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok bukan makanan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan terutama dalam beberapa tahun terakhir dengan masing-masing sebesar 6,27 persen (2002), 5,86 persen (2003), 8,27 persen (2004); 5,42 persen (2005); 4,14 persen (2006) dan sekitar 5,80 persen (2007).

Pertumbuhan “riil” ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini menunjukkan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh sekelompok penduduk.

Sementara itu tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan pula dalam perangkat data tersebut menunjukkan peningkatan di setiap tahun, baik untuk kelompok makanan maupun bukan makanan. Peningkatan harga (inflasi) yang relatif tinggi terjadi pada tahun 2002 dan 2007 dengan rincian, makanan meningkat sebesar 14,02 persen (2002) dan 14,22 persen (2007); sementara bukan makanan meningkat 14,17 persen (2002) dan 13,03 persen (2007). Dalam tahun-tahun tersebut kenaikan harga kelompok bukan makanan masih lebih tinggi daripada kelompok makanan. Bahkan kecenderungan ini terjadi di antara kurun waktu tersebut kecuali untuk tahun 2003, 2006 dan 2007, di mana harga kelompok makanan meningkat lebih tinggi daripada kelompok bukan makanan.

### **3.2. Konsumsi Akhir Pemerintah**

Konsumsi akhir pemerintah mencakup berbagai pengeluaran pemerintah dalam penggunaan berbagai produk barang dan jasa, baik dari hasil produksi domestik maupun impor. Pengeluaran pemerintah mencakup berbagai pengeluaran pemerintah untuk menunjang aktivitasnya baik di pusat maupun daerah, meliputi pengeluaran untuk belanja barang, belanja pegawai, serta penyusutan.<sup>11</sup> Belanja pegawai ditambah dengan penyusutan sama dengan Nilai Tambah Bruto (NTB) pemerintah menurut pendekatan produksi (lapangan usaha). Kemudian total pengeluaran pemerintah tersebut masih harus dikurangi dengan penerimaan pemerintah yang berasal dari penjualan barang dan jasa, karena penerimaan tersebut bukan merupakan bagian dari konsumsi akhir pemerintah.

---

<sup>11</sup> Nilai imputasi

**Tabel 8. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah  
Tahun 2002—2007**

Uraian	2002	2003	2004	2005	2006 *	2007 **
Total Konsumsi Pemerintah						
a. ADHB ( <i>Miliar Rp</i> )	132.218,8	163.701,4	191.055,6	224.980,5	288.079,9	329.760,1
b. ADHK 2000 ( <i>Miliar Rp</i> )	110.333,6	121.404,1	126.248,7	134.625,6	147.563,7	153.309,6
Proporsi terhadap PDB (% - ADHB)	7,26	8,13	8,32	8,11	8,63	8,33
Konsumsi Pemerintah per- kapita ( <i>Ribu Rp</i> )						
a. ADHB	627,41	766,57	882,96	1.027,92	1.296,54	1.465,01
b. ADHK 2000	523,56	568,50	583,45	615,10	664,13	676,10
Konsumsi Pemerintah per- pegawai pemerintah ( <i>Ribu Rp</i> )						
a. ADHB	34.503,06	44.874,23	53.258,34	61.430,88	77.332,08	81.077,9
b. ADHK 2000	28.792,02	33.279,59	35.192,86	36.759,48	39.611,95	37.694,1
Pertumbuhan <sup>12</sup>						
a. Total konsumsi pemerintah	12,99	10,03	3,99	6,64	8,81	3,89
b. Konsumsi perkapita	11,49	8,58	2,63	5,42	7,97	1,80
c. Konsumsi per-pegawai	15,96	15,59	5,75	4,45	7,76	-4,84
Jumlah Pegawai Pemerintah <sup>13</sup>	3.832.089	3.648.005	3.587.337	3.662.336	3.725.231	4.067.201
Jumlah penduduk ( <i>000 org</i> )	210.736	213.551	216.382	218.869	222.192	225.091

Keterangan : \* sementara \*\* sangat sementara

Secara total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan baik untuk harga berlaku maupun harga konstan 2000. Pada tahun 2002 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah sebesar 132.218,8 miliar rupiah yang kemudian meningkat pada tahun-tahun berikutnya 163.701,4 miliar (2003), kemudian 191.055,6 miliar (2004), 224.980,5 miliar rupiah (2005), 288.079,9 miliar (2006), dan pada tahun 2007 konsumsi akhir pemerintah telah mencapai 329.670,1 miliar rupiah. Begitu pula dengan konsumsi pemerintah pada harga konstan 2000 yang juga mengalami peningkatan pada masing-

<sup>12</sup> Diturunkan dari perhitungan PDB (atas dasar harga konstan /ADHK 2000)

<sup>13</sup> Tidak termasuk polisi dan militer

masing tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dalam hal bentuk kuantitas.

Menarik untuk dicermati lebih jauh bahwa pangsa atau proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDB juga mengalami peningkatan, dari yang hanya 7,26 persen (tahun 2002) sampai mencapai 8,33 persen (tahun 2007). Sepanjang kurun waktu tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2002 sebesar 7,26, sedangkan proporsi tertinggi mencapai 8,63 pada tahun 2006. Peningkatan ini cenderung didominasi oleh pengeluaran pemerintah untuk belanja barang, hal ini dapat disimpulkan bahwa ternyata peningkatan konsumsi akhir pemerintah juga menjadi salah unsur pendorong dalam meningkatkan besaran nilai PDB.

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan layanan kepada publik atau masyarakat baik bersifat kolektif maupun individual. Dalam prakteknya pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik secara langsung maupun tidak langsung. Apabila konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti pula oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah perkapita. Pada tahun 2002 konsumsi pemerintah perkapita sebesar 627,41 ribu rupiah (ADHB), terus meningkat pada tahun-tahun setelah itu, yaitu menjadi 766,57 ribu (2003); 882,96 ribu (2004); 1.027,92 ribu (2005); 1.296,54 ribu (2006) dan sudah mencapai 1.465,01 ribu rupiah pada tahun 2007. Rata-rata pada harga konstan (2000) juga menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya dengan masing-masing senilai 523,56 ribu (2002); 568,50 ribu (2003); 583,45 ribu (2004); 615,10 ribu (2005), 664,13 (2006) dan 676,10 (2007). Peningkatan pada harga konstan ini menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi secara kuantitas dengan laju pertumbuhan sebesar 11,49 persen (2002); 8,58 persen (2003); 2,63 persen

(2004); 5,42 persen (2005), 7,97 persen (2006) dan 1,80 persen (2007).

**Tabel 9. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Indonesia  
Tahun 2002—2007**

Uraian	2002	2003	2004	2005	2006 *	2007 **
Struktur Konsumsi Akhir (belanja) Pemerintah <sup>14</sup>						
a. Barang ( <i>Miliar Rp</i> )	54.432,5	68.840,9	78.862,9	102.279,1	136.342,1	150.236,3
(%)	(41,17)	(42,05)	(41,28)	(45,46)	(47,33)	(45,56)
b. Pegawai & penyusutan ( <i>Miliar Rp</i> )	83.293,5	101.605,7	121.129,6	135.132,7	167.799,6	205.343,9
(%)	(63,00)	(62,07)	(63,40)	(60,06)	(58,25)	(62,27)
c. Penerimaan brg jasa ( <i>min</i> ) ( <i>Mil Rp</i> )	5.507,2	6.745,2	8.936,8	12.431,3	16.061,9	25.820,1
(%)	(-4,17)	(-4,12)	(-4,68)	(-5,53)	(5,58)	(7,83)
Total Konsumsi ( <i>Miliar Rp</i> )	132.218,8	163.701,4	191.055,63	224.980,54	288.079,87	329.760,1
(%)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Perkembangan (ADHB) <sup>15</sup> (%)						
a. Barang	120,04	151,82	173,92	225,56	300,68	331,32
b. Pegawai & penyusutan	119,92	146,28	174,39	194,55	241,58	295,63
c. Penerimaan barang & jasa	22,92	28,08	37,20	51,74	66,86	107,47
Total Konsumsi	145,65	180,33	210,46	247,83	317,34	363,25
Pertumbuhan riil (ADHK) (%)						
a. Barang	25,49	24,36	8,26	14,32	15,90	6,66
b. Pegawai & penyusutan	0,40	0,94	1,65	1,90	3,96	5,43
c. Penerimaan barang & jasa	-42,44	9,13	17,86	26,56	11,42	44,45
Total Konsumsi	12,99	10,03	3,99	6,64	9,61	3,89
Pertumbuhan indeks harga (%) implisit <sup>16</sup>						
a. Barang	6,31	1,70	5,82	13,45	15,02	3,31
b. Pegawai & penyusutan	1,35	20,84	17,28	9,48	19,44	16,07
c. Penerimaan barang & jasa	3,60	12,23	12,42	9,91	15,96	11,29
Total Konsumsi	3,17	12,52	12,23	10,43	16,82	10,18

Keterangan : \* sementara \*\* sangat sementara

Rata-rata konsumsi per pegawai pemerintah menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2002 konsumsi pemerintah per-pegawai pemerintah bernilai sebesar 34.503,06 ribu rupiah; kemudian meningkat menjadi 44.874,23 ribu rupiah (2003); 53.258,34 ribu rupiah (2004); 61.430,88 ribu rupiah (2005), 77.332,08 ribu rupiah (2006) dan mencapai 81.077,90

<sup>14</sup> Diturunkan dari perhitungan PDB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

<sup>15</sup> Perbandingan terhadap tahun dasar (2000)

<sup>16</sup> Tingkat perubahan harga produk konsumsi

ribu rupiah (2007). Pada harga konstan 2000 indikator pemerataan menurut pegawai ini juga menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Persentase kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2002 dan 2003, masing-masing sebesar 15,96 persen dan 15,59 persen.

Meskipun pengeluaran konsumsi akhir pemerintah terus menunjukkan peningkatan (baik untuk harga berlaku maupun harga konstan 2000), tetapi sebaliknya jumlah pegawai pemerintah justru mengalami penurunan. Apabila tahun 2002 jumlah pegawai pemerintah tercatat sebanyak 3.832.089 orang maka hingga tahun 2004 terjadi sedikit pengurangan jumlah pegawai pemerintah dengan posisi pada masing-masing 3.648.005 orang (2003), 3.587.337 orang (2004). Tahun-tahun selanjutnya terjadi kenaikan yaitu 3.662.336 orang (2005), 3.725.231 orang (2006) dan 4.067.201 orang (2007). Dalam kurun waktu tersebut (dari tahun 2002 ke tahun 2007) secara total terjadi penambahan jumlah pegawai pemerintah sebanyak 235.112 orang atau naik sebesar 6,14 persen dari tahun 2002. Kenaikan tersebut di antaranya disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan pegawai pada institusi pemerintahan.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” ini menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan/total maupun secara rata-rata (per penduduk maupun per pegawai pemerintah). Parameter ini merupakan pendekatan dalam mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumberdaya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan yang tertinggi terjadi pada tahun 2002 dan 2003 dengan rincian untuk total konsumsi pemerintah masing-masing tahun sebesar 12,99 persen dan 10,03 persen; untuk konsumsi perkapita 11,49 persen dan 8,58 persen; sedangkan untuk konsumsi per pegawai 15,96 persen dan 15,59 persen. Sebaliknya perlambatan pertumbuhan secara keseluruhan terjadi pada tahun 2004 yaitu 3,99 persen (total konsumsi pemerintah); Sedangkan untuk konsumsi perkapita dan konsumsi per pegawai mengalami perlambatan pertumbuhan pada tahun 2007 yaitu sebesar 1,80 persen dan -5,54 persen.

Secara struktur, bagian terbesar dari pengeluaran pemerintah adalah untuk menutup

belanja pegawai, yang di dalamnya termasuk pula pengeluaran untuk penyusutan (nilai depresiasai atas barang-barang kapital pemerintah). Hampir 60 persen pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai komponen dari belanja rutin tersebut. Data berikut ini menunjukkan bahwa proporsi pengeluaran untuk belanja pegawai dan penyusutan tersebut cenderung semakin menurun. Meskipun secara nominal pengeluaran jenis ini mengalami peningkatan dari sebesar 83.293,5 miliar rupiah (2002), kemudian 101.605,7 miliar rupiah (2003), 121.129,6 miliar rupiah (2004) kemudian 135.132,7 miliar rupiah (2005) kemudian 167.799,6 miliar rupiah (2006) dan 205.343,9 miliar rupiah (2007), tetapi tidak demikian dengan proporsinya terhadap total konsumsi akhir pemerintah. Apabila pada tahun 2002 proporsinya mencapai 63,00 persen, menurun menjadi 62,07 persen (2003). Namun pada tahun berikutnya (2004) mengalami kenaikan menjadi 63,40 persen, serta menurun kembali pada tahun 2005 menjadi 60,06 persen, 58,25 persen pada tahun 2006 dan 62,27 persen pada tahun 2007.

Belanja barang pemerintah secara nominal mengalami peningkatan, tahun 2002 dari sebesar 54.432,5 miliar (2002), kemudian meningkat kembali menjadi 68.840,9 miliar (2003), 78.862,9 miliar (2004), dan menjadi 102.279,1 miliar rupiah (2005), meningkat cukup tinggi pada tahun 2006 hingga mencapai 136.342,1 miliar rupiah dan 150.236,3 miliar rupiah pada tahun 2007. Sementara itu secara umum proporsi belanja barang juga cenderung meningkat, pada tahun 2002 belanja barang mempunyai kontribusi sebesar persen (2002) dan 42,05 persen pada tahun 2003, pada tahun 2004 turun sedikit menjadi 41,28 persen. Selanjutnya pada tahun 2005 meningkat kembali menjadi 45,46 persen, tahun 2006 mencapai 47,33 persen dan pada tahun 2007 sebesar 45,56 persen.

Hal lain yang patut dicermati adalah rasio tentang perbandingan antara jumlah pegawai pemerintah dengan jumlah penduduk. Data di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai pemerintah mengalami penurunan secara gradual dari yang sebesar 3.832 ribu orang (2002) kemudian menjadi 3.648 ribu orang (2003), turun lagi menjadi 3.587 ribu orang

(2004), tetapi pada tahun 2005, 2006 dan 2007 meningkat masing-masing menjadi 3.663 ribu orang, 3.725 ribu orang dan 4.067 ribu orang. Sebaliknya jumlah penduduk sebagaimana kita ketahui meningkat dari sejumlah 210.736 ribu orang pada tahun 2002 menjadi 225.091 ribu orang pada tahun 2007. Rasio antara penduduk dengan pegawai pemerintah dalam kurun waktu tersebut cenderung meningkat dengan masing-masing adalah 54,99 (2002); 58,54 (2003); 60,32 (2004); 59,76 (2005); 59,65 (2006) dan 55,34 (2007). Artinya jika pada pada tahun 2002 setiap satu pegawai pemerintah melayani sekitar 55 penduduk maka pada tahun 2007 meningkat menjadi sekitar 56 penduduk.

### 3.3. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada data PDB menurut penggunaan di sini lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai berbagai produk barang dan jasa yang digunakan menjadi investasi fisik (kapital)<sup>17</sup> di wilayah ekonomi domestik Indonesia. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) dalam proses produksi pada berbagai sektor lapangan usaha, yang produknya bisa berasal dari hasil produksi domestik maupun dari impor.

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Data di bawah berikut ini menjelaskan bahwa pertumbuhan PMTB secara keseluruhan dalam kurun waktu 2002-2007 secara rata-rata mampu meningkat sampai 4,69 persen. Pertumbuhan PMTB pada masing-masing komponennya sangat bervariasi antar tahunnya. Bangunan/konstruksi, baik yang berupa bangunan tempat tinggal (*residential building*) maupun bangunan bukan tempat tinggal (*non-residential building*) merupakan komponen dengan pangsa terbesar dalam pembentukan modal tetap di sini. Pertumbuhan di sektor

---

17 Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

bangunan meskipun cenderung meningkat tetapi polanya relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan pada komponen PMTB lainnya.

Proporsi terbesar kedua setelah bangunan adalah kelompok mesin dan perlengkapan, khusus yang produknya berasal dari impor. Proporsi kelompok barang modal ini terhadap total PMTB yang terbesar terjadi pada tahun 2005 (10,14 persen), kemudian 2002 (9,83 persen), serta tahun 2004 (9,34 persen), sementara di tahun-tahun lainnya proporsinya berkisar antara 9 sampai dengan 7 persen. Barang modal dalam bentuk mesin dan perlengkapannya cenderung menurun khususnya bagi penggunaan produk dalam negeri, dari yang sekitar 3,07 persen di tahun 2002 bergeser menjadi 1,79 persen pada tahun 2007. Pada 2002 pertumbuhan kelompok barang modal ini mencapai angka tertinggi yaitu sebesar 39,58 persen, setelah itu pertumbuhan mulai menunjukkan perlambatan yaitu masing-masing 0,98 persen (2003) dan 16,11 persen (2004), bahkan pada tahun 2005 menunjukkan penurunan hingga mencapai *minus* 14,99 persen. Sekalipun demikian, pertumbuhannya kembali membaik pada tahun 2007 dengan mencapai angka pertumbuhan sebesar 26,34 persen. Sebaliknya barang modal yang berasal dari impor mengalami penurunan pertumbuhan secara tajam pada tahun 2003 (*minus* 17,44 persen), bahkan pada tahun 2006 mengalami penurunan hingga mencapai *minus* 25,74 persen dengan catatan sempat ada pertumbuhan positif yang cukup signifikan pada tahun 2004. meskipun pada tahun 2004 pertumbuhan meningkat cukup signifikan hingga mencapai 59,17 persen.

Alat angkutan juga mempunyai proporsi yang relatif besar terutama bagi alat angkutan yang berasal dari produk impor. Namun pangsa tersebut semakin menurun dari sebesar 4,73 persen pada tahun 2002 menjadi 2,72 persen pada tahun 2007. Sementara alat angkutan yang berasal dari produksi dalam negeri cenderung menurun dari 1,85 persen (2002) menjadi 0,83 persen (2007). Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing kelompok barang modal. Pertumbuhan “riil” alat angkutan dalam negeri mengalami peningkatan cukup

signifikan, bahkan pada tahun 2004 mengalami peningkatan secara signifikan (23,35 persen), meskipun pada tahun 2006 terjadi juga penurunan yang signifikan sebesar minus 42,86 persen. Sementara alat angkutan yang berasal dari luar negeri memiliki pertumbuhan yang sangat berfluktuasi, menurun sebesar *minus* 9,82 persen (2002), dan *minus* 41,89 persen (2003), kemudian pada tahun berikutnya meningkat kembali sebesar 41,01 persen, 38,47 persen (2005) dan pada tahun 2006 dan 2007 sebesar 19,76 persen dan 17,34 persen. Meskipun peningkatannya nampak tajam tetapi kondisi ini hanya sekedar menggambarkan pemulihan kembali nilai impor barang modal pada posisi tahun-tahun sebelumnya.

Barang modal kelompok lainnya mempunyai proporsi barang modal yang berasal dari dalam negeri lebih besar daripada barang impor. Proporsi barang modal lainnya dalam negeri menurun setiap tahunnya (dari 2,57 persen di tahun 2002 menjadi 1,87 persen di tahun 2007); sebaliknya pangsa barang modal impor lainnya relatif tidak berfluktuasi, yaitu berkisar antara 0,6 hingga 0,9 sepanjang rentang waktu observasi. Sementara jika dilihat pertumbuhannya, barang modal lainnya ini menunjukkan pola yang sangat variatif antar tahunnya. Pertumbuhan kelompok barang modal dalam negeri cenderung meningkat, hanya pada tahun 2002 dan 2005 saja yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar *minus* 2,25 persen dan *minus* 2,32. Sebaliknya barang modal luar negeri mengalami perlambatan pertumbuhan sampai dengan tahun 2003, baru pada tahun berikutnya (2004) pertumbuhannya mulai meningkat kembali dengan sangat signifikan (62,70 persen) dan 12,65 persen pada tahun 2005. Peningkatan ini menyebabkan proporsi kelompok barang modal lainnya yang berasal dari impor meningkat (dari 0,67 persen tahun 2003 menjadi 0,78 persen pada tahun 2007).

Secara umum, pertumbuhan PMTB mengalami peningkatan secara signifikan di mana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2004 yang mencapai besaran angka 14,68 persen, dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2003 yaitu hanya sebesar 0,60

persen.

**Tabel 10. Perkembangan dan Struktur Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)  
Indonesia Tahun 2002—2007**

Uraian	2002	2003	2004	2005	2006 *	2007**
Total PMTB						
a. ADHB (Miliar Rp)	353.967,0	392.788,6	515.381,2	655.854,3	805.470,3	983.830,9
b. ADHK 2000 (Miliar Rp)	307.584,6	309.431,1	354.865,7	393.500,5	403.161,9	440.078,2
Proporsi terhadap PDB (% - ADHB)	19,43	19,51	22,45	23,64	24,12	24,86
Struktur PMTB <sup>18</sup>						
a. Bangunan/Konstruksi (Miliar Rp)	272.840,8	323.998,4	412.370,5	523.662,0	674.008,8	819.152,5
(%)	(77,08)	(82,49)	(80,01)	(79,84)	(83,68)	(83,26)
b. Mesin & perlengk. (Mil Rp)						
- Dalam Negeri (Mil Rp)	10.863,2	10.924,4	13.244,2	12.006,5	12.912,9	17.604,2
(%)	(3,07)	(2,78)	(2,57)	(1,83)	(1,60)	(1,79)
- Luar Negeri (Mil Rp)	34.778,3	28.609,1	48.132,1	66.533,3	61.839,3	86.070,7
(%)	(9,83)	(7,28)	(9,34)	(10,14)	(7,68)	(8,75)
c. Alat Angkutan						
- Dalam Negeri (Mil Rp)	6.563,0	6.885,8	9.529,3	12.107,9	6.327,0	8.181,6
(%)	(1,85)	(1,75)	(1,85)	(1,85)	(0,79)	(0,83)
- Luar Negeri (Mil Rp)	16.751,1	10.065,2	15.240,8	22.651,4	28.715,0	26.737,6
(%)	(4,73)	(2,56)	(2,96)	(3,45)	(3,56)	(2,72)
d. Modal (Kapital) lainnya						
- Dalam Negeri (Mil Rp)	9.082,6	9.662,8	12.332,1	13.506,4	15.793,4	18.386,5
(%)	(2,57)	(2,46)	(2,39)	(2,06)	(1,96)	(1,87)
- Luar Negeri (Mil Rp)	3.088,0	2.642,9	4.532,2	5.386,6	5.874,0	7.697,7
(%)	(0,87)	(0,67)	(0,88)	(0,82)	(0,73)	(0,78)
Total PMTB (Miliar Rp)	353.967,0	392.788,6	515.381,2	655.854,3	805.470,3	983.830,9
(%)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Pertumbuhan <sup>19</sup> (%)						
a. Bangunan	5,48	6,10	7,49	7,54	8,33	8,61
b. Mesin & perlengkapan						
- Dalam Negeri	39,58	0,98	16,11	-14,99	3,15	26,34
- Luar Negeri	3,56	-17,44	59,17	31,00	-25,74	21,43
c. Alat Angkutan						
- Dalam Negeri	4,22	4,17	23,35	17,52	-42,06	18,54
- Luar Negeri	-9,82	-41,89	41,01	38,47	19,76	-17,34
d. Modal (Kapital) lainnya						
- Dalam Negeri	-2,25	4,04	25,51	-2,32	9,39	0,13
- Luar Negeri	-15,89	-13,99	62,70	12,65	3,60	23,54
Total PMTB	4,69	0,60	14,68	10,89	2,46	9,16

Keterangan : \* sementara \*\* sangat sementara

<sup>18</sup> Diturunkan dari perhitungan PDB (atas dasar harga berlaku /ADHB )

<sup>19</sup> Diturunkan dari perhitungan PDB (atas dasar harga konstan/ADHK 2000)

### 3.4. Perubahan Inventori

Perubahan inventori merupakan istilah terbaru yang diperkenalkan dalam penghitungan PDB seri konstan 2000, sesuai dengan istilah yang digunakan dalam SNA'93.<sup>20</sup> Dalam PDB seri konstan sebelumnya (1993) istilah ini disebut sebagai “perubahan stok” yang merupakan butir penyeimbang (residual) atau perbedaan antara total nilai PDB menurut penggunaan dengan total nilai PDB menurut lapangan usaha. Dilihat besarannya apabila komponen tersebut bertanda “**positif**” berarti nilai PDB menurut lapangan usaha lebih besar dari pada nilai PDB menurut penggunaan, sebaliknya apabila bertanda “**negatif**” berarti PDB menurut lapangan usaha lebih kecil daripada nilai PDB menurut penggunaan. Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: perubahan inventori dan diskrepansi statistik. Pada seri konstan 2000, mengingat data atau informasi tentang inventori ini sudah mulai tersedia dan tertata dengan relatif baik, dalam beberapa waktu terakhir, maka estimasi perubahan inventori mulai dipisahkan dari diskrepansi statistik.

Secara konsep yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” atas berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Khusus di sektor perdagangan inventori bisa berupa persediaan barang dagangan. Perubahan di sini bisa merupakan penambahan (bertanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif). Barang tersebut bisa berupa produk jadi, produk setengah jadi, bahan baku, bahan penolong maupun barang strategis pemerintah, yang belum terserap oleh pasar. Lingkup inventori di antaranya meliputi karet kering, biji sawit, coklat, kopi, teh kulit kina, tembakau, rami, minyak mentah, kondensat, gas alam, elpiji, batu bara (andensit dan antrasit), aspal, bauksit, granit, emas dan sebagainya.

---

20 *System of National Account 1993 (United Nations)*

Dilihat dari sisi penghitungan, komponen ini merupakan satu-satunya komponen yang dapat memiliki 2 (dua) angka, yaitu positif dan negatif. Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan pada inventori bisa mengindikasikan bahwa distribusi (pemasaran) tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum perubahan inventori ini dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan pada akhir tahun dari 2 (dua) posisi nilai persediaan (konsep stok).

**Tabel 11. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori  
Tahun 2002—2007**

Uraian	2002	2003	2004	2005	2006 *	2007 **
Total Nilai Inventori						
a. ADHB (Miliar Rp)	35.979,5	122.681,9	36.911,1	39.974,6	42.382,2	169,7
b. ADHK 2000 (Miliar Rp)	13.085,0	45.996,7	25.099,1	33.508,3	29.026,8	911,9
Proporsi terhadap PDB (% - ADHB)	1,97	6,09	1,61	1,44	1,27	0,00
Struktur Inventori <sup>21</sup>						
Total inventori (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Hasil Perkebunan	0,47	-8,00	-5,65	-0,65	13,18	7,31
- Hasil Pertambangan	48,53	126,88	52,58	15,14	-36,22	4,16
- Hasil Industri	44,33	-17,55	39,06	98,46	46,77	5,87
- Lainnya	6,66	-1,33	14,01	-12,95	66,27	36,66

Keterangan : \* sementara \*\* sangat sementara

Berbeda dengan komponen penggunaan lainnya yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dilihat dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen ini tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana yang dilakukan pada komponen penggunaan lainnya. Hal pokok yang dapat dilihat dari komponen ini adalah pangsa (proporsi) dalam perangkat PDB yang mempunyai besaran nilai yang berfluktuatif baik dalam besaran maupun tandanya

<sup>21</sup> Diturunkan dari perhitungan PDB (ADHB)

(panambahan atau pengurangan).

Pada tahun 2002 terjadi penambahan inventori (tanda positif) sebesar 35.979,5 miliar yang sebagian besar dalam bentuk hasil pertambangan dengan persinya sebesar 48,53 persen. Pada tahun yang sama terjadi pula peningkatan stok inventori pada industri pengolahan dengan besaran sebesar 44,33 persen. Pada tahun 2003 terjadi penambahan inventori sebesar 122.681,9 miliar di mana merupakan penambahan pada inventori jenis hasil pertambangan (126,88 persen), komponen inventori lainnya tercatat negatif.

Kemudian pada tahun 2004 terjadi peningkatan persediaan inventori sebesar 36.911,1 miliar rupiah di mana sebagian besar didominasi oleh pelepasan inventori hasil pertambangan (52,58 persen) diikuti oleh komponen hasil industri (39,06 persen). Pada tahun 2005 terjadi peningkatan inventori sebesar 39.974,6 miliar rupiah, kali ini sebagian besar didominasi oleh hasil industri dengan proporsi sebesar 61,70 persen. Tahun 2006 juga menunjukkan peningkatan perubahan inventori sebesar 42.382,2 miliar rupiah, sebagian besar merupakan kontribusi dari hasil inventori kelompok lainnya yang sebesar 66,27 persen. Pada Tahun 2007 terjadi kenaikan inventori sebesar 169,7 miliar, yang sebagian besar juga terjadi pada kelompok lainnya sebanyak 36,66 persen.

### **3.5. Ekspor**

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan tentang berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik karena dikonsumsi oleh pihak luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ekspor mencakup pembelian barang dan jasa oleh penduduk negara lain/luar negeri (non residen) terhadap produk ekonomi domestik yang secara umum mencakup perdagangan barang, pengangkutan dan komunikasi, serta asuransi. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sejenisnya. Dalam penghitungan PDB, ekspor barang digolongkan

menurut 2 (dua) kelompok utama yaitu minyak dan bukan minyak.

**Tabel 12. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa  
Tahun 2002—2007**

Uraian	2002	2003	2004	2005	2006 *	2007 **
Total Nilai Ekspor						
a. ADHB (Miliar Rp)	595.514,0	613.720,8	739.639,3	945.121,8	1.036.316,5	1.161.956,4
b. ADHK 2000 (Miliar Rp)	566.188,4	599.516,4	680.621,0	793.613,0	868.256,5	937.849,2
Proporsi terhadap PDB (% - ADHB)	32,69	30,48	32,22	34,07	31,03	29,36
Struktur Ekspor <sup>22</sup>						
a. Barang (Mil Rp)	535.232,5	554.868,2	671.876,1	852.880,7	942.980,0	1.063.538,3
(%)	(89,88)	(90,41)	(90,84)	(90,24)	(90,99)	(91,53)
- Minyak (Mil Rp)	113.608,4	124.170,9	146.814,1	191.675,76	198.294,91	N/A
(%)	(19,08)	(20,23)	(19,85)	(22,47)	(21,03)	(N/A)
- Non-minyak (Mil Rp)	421.624,1	430.697,3	525.062,0	661.204,95	743.675,08	N/A
(%)	(70,80)	(70,18)	(70,99)	(77,53)	(78,80)	(N/A)
b. Jasa (Mil Rp)	60.281,5	58.852,6	67.763,2	92.241,1	93.336,3	98.418,1
(%)	(10,12)	(9,59)	(9,16)	(9,76)	(9,01)	(8,47)
Total ekspor (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan <sup>23</sup>						
- Barang	-2,37	6,76	13,37	16,95	9,68	7,45
- Jasa	10,29	-1,83	15,01	13,28	6,77	13,71
Total ekspor	-1,22	5,89	13,53	16,60	9,41	8,02

Keterangan : \* sementara \*\* sangat sementara

Secara total, nilai ekspor menunjukkan peningkatan sejalan dengan semakin bertambahnya permintaan pasar luar negeri terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh Indonesia. Peningkatan tersebut didukung oleh semakin meningkatnya intensitas perdagangan dengan berbagai negara lain, yang direfleksikan melalui kenaikan dalam volume maupun harga, sebagaimana digambarkan pada seri data di atas. Namun peningkatan tersebut tidak selalu diikuti oleh peningkatan proporsinya dalam PDB. Jika pada tahun 2002 proporsinya mencapai 32,69 persen tetapi pada tahun 2007 tinggal sebesar 29,36 persen. Meskipun secara otomatis ekspor akan mengurangi persediaan/suplai

<sup>22</sup> Diturunkan dari perhitungan PDB (ADHB)

<sup>23</sup> Diturunkan dari perhitungan PDB (ADHK 2000)

domestik, tetapi di sisi lain ekspor akan menambah devisa negara.

Dalam kurun waktu tersebut nilai ekspor produk barang dan jasa Indonesia menunjukkan adanya peningkatan, baik untuk harga berlaku maupun harga konstan 2000. Pada tahun 2002 nilai ekspor mencapai 595.514,0 miliar kemudian naik menjadi 613.720,8 miliar (2003) Setelah itu meningkat kembali pada tahun 2004, 2005, 2006 dan 2007 masing-masing sebesar 739.639,3 miliar, 945.121,8 miliar, 1.036.316,5 miliar, dan 1.161.956,4 miliar rupiah. Sejalan dengan kondisi harga berlaku, nilai ekspor pada harga konstan 2000 juga menunjukkan arah pertumbuhan yang sama, yaitu cenderung meningkat kecuali pada tahun 2002 yang menurun dengan nilai “riil” masing-masing tahun sebesar 566.188,4 miliar (2002); 599.516,4 miliar (2003); 680.621,0 miliar (2004); 793.613,0 miliar (2005); 868.256,5 miliar (2006); bahkan pada tahun 2007 mencapai 937.849,2 miliar rupiah. Meskipun secara nominal nilai ekspor ini mengalami peningkatan tetapi sebaliknya proporsinya dalam PDB justru menurun yaitu dari 32,69 persen pada tahun 2002 menjadi 29,36 persen di tahun 2007 (di mana 30,48 persen di tahun 2003; 32,22 persen di tahun 2004; 34,07 pada tahun 2005, dan 31,03 pada tahun 2006).

Menurut komposisinya, sebagian besar ekspor Indonesia berupa produk barang (rata-rata 90 persen), yang di dalamnya mencakup minyak bumi dengan proporsi yang mencapai sekitar 20 persen, sedangkan sisanya dalam bentuk ekspor barang lain non-minyak (di atas 70 persen). Sementara nilai ekspor dalam bentuk jasa memiliki peran yang tidak terlalu besar dengan proporsi di masing-masing tahun sebesar 10,12 persen (2002); 9,59 persen (2003); 9,16 persen (2004); 9,76 persen (2005); 9,01 persen (2006); dan 8,47 persen pada tahun 2007.

Pertumbuhan riil total ekspor mencapai angka yang sangat tinggi khususnya pada tahun 2004 dan 2005, masing-masing tahun mencapai 13,53 persen dan 16,60 persen. Pertumbuhan yang tinggi tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan volume ekspor dalam bentuk barang. Sementara pada saat yang bersamaan, ekspor jasa juga mengalami

peningkatan masing-masing sebesar 15,01 persen (2004) dan 13,28 persen (2005). Meskipun pada setiap tahun ekspor mengalami pertumbuhan namun pada tahun 2002 ekspor mengalami penurunan pertumbuhan sebesar *minus* 1,22 persen. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan ekspor barang (*minus* 2,37 persen) yang memiliki peran sangat dominan dalam kegiatan transaksi perdagangan internasional ini.

### 3.6. Impor

Berbeda dengan transaksi ekspor, impor menjelaskan tentang adanya tambahan penyediaan produk (*supply*) di wilayah ekonomi domestik dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa meskipun penggolongan rincinya bisa berbeda dengan ekspor. Karena impor bukan merupakan produk yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi domestik Indonesia, oleh karena itu impor harus dikeluarkan dari perhitungan PDB. Dengan demikian, maka PDB akan menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh Indonesia.

Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan Indonesia terhadap ekonomi (produk) negara lainnya (*Rest of World*). Secara umum, produk impor dibedakan menurut barang dan jasa. Pada tingkat yang agak rinci impor barang dibedakan menurut 3 (tiga) kategori yaitu: barang konsumsi, bahan baku dan barang modal. Penggolongan ini disesuaikan dengan tatacara pencatatan serta pengelompokannya dalam dokumen impor (PIB). Pada komponen impor ini termasuk pula pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Indonesia di luar negeri, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa).

**Tabel 13. Perkembangan Impor Barang dan Jasa**  
**Tahun 2002—2007**

Uraian	2002	2003	2004	2005	2006 *	2007 **
Total Nilai Impor						
a. ADHB (Miliar Rp)	480.815,4	465.940,9	632.376,1	830.083,4	855.587,8	1.002.507,0
b. ADHK 2000 (Miliar Rp)	422.271,4	428.874,6	543.183,8	639.701,9	694.605,3	756.348,3
Proporsi terhadap PDB (% - ADHB)	26,39	23,14	27,54	29,92	25,62	25,33
Struktur Impor <sup>24</sup>						
a. Barang (Mil Rp)	316.781,9	305.351,3	455.139,2	609.594,0	651.227,9	792.225,7
(%)	(65,88)	(65,53)	(71,97)	(73,44)	(76,11)	(79,02)
- Brg konsumsi (Mil Rp)	22.971,2	26.842,2	36.998,0	48.904,55	48.803,37	N/A
(%)	(4,78)	(5,76)	(5,85)	(5,89)	(5,71)	(N/A)
- Bahan baku (Mil Rp)	244.158,5	239.233,8	354.078,7	473.233,86	504.110,03	N/A
(%)	(50,78)	(51,34)	(55,99)	(57,01)	(58,92)	(N/A)
- Barang modal (Mil Rp)	49.652,2	39.275,3	64.062,4	87.630,66	98.991,62	N/A
(%)	(10,33)	(8,43)	(10,13)	(10,56)	(11,57)	(N/A)
b. Jasa (Mil Rp)	164.033,4	160.589,6	177.237,0	220.489,5	204.359,9	210.281,3
(%)	(34,12)	(34,47)	(28,03)	(26,56)	(23,89)	(20,98)
Total impor (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan <sup>25</sup>						
- Barang	-5,17	2,79	35,70	21,46	6,80	13,08
- Jasa	-2,18	-1,12	6,08	7,04	14,49	-4,02
Total impor	4,25	1,56	26,65	17,77	8,58	8,89

Keterangan : \* sementara \*\* sangat sementara

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa meskipun nilai impor Indonesia meningkat (baik harga berlaku maupun harga konstan 2000), tetapi kontribusinya dalam PDB cenderung fluktuatif. Pada tahun 2007 nilai impor sudah mencapai 1,002,507.0 miliar rupiah yang merupakan peningkatan signifikan dari kondisi tahun 2006 yang sebesar 855,587.8 miliar Rupiah. Tetapi proporsinya justru menurun sekalipun tidak signifikan yaitu menjadi 25,33 dibandingkan dengan tahun 2005 yang sebesar 25,62 persen.

Pola perkembangan impor Indonesia selama waktu tersebut sangatlah berfluktuasi,

<sup>24</sup> Diturunkan dari perhitungan PDB (ADHB)

<sup>25</sup> Diturunkan dari perhitungan PDB (ADHK 2000)

adakalanya meningkat dan adakalanya pula menurun. Pada perhitungan harga berlaku, tren nilai impor telah mencapai besaran 480.815,4 miliar Rupiah (2002), dan menurun lagi pada tahun berikutnya menjadi 465.940,9 miliar, namun meningkat kembali secara signifikan menjadi 632.376,1 miliar rupiah pada tahun 2004. Bahkan nilai impor pada tahun 2005 meningkat hingga mencapai besaran 830,083.4 miliar rupiah dan 855,587.8 miliar rupiah pada tahun 2006. Sedangkan pada tahun 2007, impor mencapai 1,002,507.0. Di sisi lain secara riil nilai impor juga mengalami peningkatan, meskipun masih terjadi penurunan pertumbuhan pada tahun 2002, sebesar *minus* 4,25 persen. Peningkatan secara signifikan terjadi pada tahun 2004 sebesar 26,65 persen akibat dari melonjaknya transaksi impor dalam bentuk produk barang (35,70 persen). Sementara itu, penurunan pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2002 disebabkan oleh penurunan impor barang (*minus* 5,17 persen) maupun impor jasa (*minus* 2,18 persen). Pada tahun 2007 pertumbuhan total impor mencapai 8,89 persen, pertumbuhan sebesar 13,08 persen pada impor barang dan -4,02 persen pada impor jasa. Pertumbuhan terbesar bagi impor jasa terjadi pada tahun 2006 yang mampu mencapai 14,49 persen namun mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2007.

Dilihat dari komposisinya, sebagian besar produk impor berbentuk barang yang memiliki porsi lebih dari 65 persen, sedangkan sisanya dalam bentuk impor jasa. Impor dalam bentuk barang sebagian besar berupa bahan baku yang didatangkan untuk mendukung kegiatan industri domestik (antara 50 sampai dengan 60 persen). Impor dalam bentuk barang konsumsi yang pada awalnya mempunyai pertumbuhan relatif lambat, tetapi sejak tahun 2003 mulai meningkat kembali sehingga mampu meningkatkan pangsaanya dari 4,78 persen (2002); kemudian menjadi 5,76 persen (2003); meningkat lagi menjadi 5,85 persen (2004); dan pada tahun 2005 menjadi 5,89 persen dari seluruh total nilai impor. Namun pada tahun 2006 mengalami penurunan proporsi sebesar 7,71 persen. Sementara itu pangsa impor bahan baku memiliki pola yang serupa, di mana pangsaanya mengalami

penurunan sampai dengan tahun 2003 (51,34 persen) tetapi kemudian meningkat lagi dengan proporsi masing-masing 55,99 persen (2004), bahkan pada tahun 2007 pangsa sudah mencapai 58,92 persen. Proporsi impor barang modal terhadap total nilai impor juga memiliki pola yang hampir serupa “menurun meskipun kemudian meningkat” kembali pada beberapa tahun terakhir. Proporsi impor barang modal pada tahun 2002 sebesar 10,33 persen dan menurun pada tahun 2003 (8,43 persen), kemudian setelah itu mulai meningkat kembali dan mencapai level 10,56 persen pada tahun 2005 dan 11,57 persen pada tahun 2006.

Impor jasa mempunyai pola struktur yang agak berbeda dengan impor barang. Pada tahun 2002 proporsinya mencapai besaran 34,12 persen yang meningkat pada tahun 2003 sebesar 34,47 persen. Setelah itu porsinya mulai tergeser lagi oleh impor barang sehingga pada tahun 2004 hanya mempunyai pangsa sebesar 28,03 persen dari total nilai impor. Bahkan pada tahun 2006 dan 2007 porsi ini menurun kembali yaitu sebesar 23,89 persen dan 20,98 persen dibandingkan dengan impor tahun sebelumnya (2004).

Pada kenyataannya dalam menghitung konsumsi akhir (rumah tangga dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan mungkin ekspor, di dalamnya masih terkandung komoditas yang berasal dari impor. Padahal impor bukan merupakan bagian dari produk ekonomi domestik, meskipun produknya sudah dikonsumsi oleh masyarakat domestik yang alokasi pemanfaatannya tersebar pada seluruh komponen penggunaan akhir. Oleh karena itu untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari perhitungan, yaitu dengan cara mengurangi total nilai PDB (E) dengan total nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan total nilai PDB menurut lapangan usaha (sektor).

## **BAB IV**

### **AGREGAT PDB MENURUT PENGGUNAAN DAN PENDAPATAN NASIONAL INDONESIA TAHUN 2002—2007**

Berdasarkan data PDB dapat diturunkan berbagai indikator ekonomi makro yang dapat dipakai dalam tentang analisis deskriptif PDB serta keterkaitannya dengan variabel sosial ekonomi lainnya. PDB Indonesia yang diukur melalui pendekatan lapangan usaha dan penggunaan memberikan dua dimensi analisis yang berbeda, meskipun secara total nilai ekonominya sama besar. Dari dua dimensi ini paling tidak mampu menjelaskan bagaimana pendapatan diciptakan dan untuk apa digunakannya. Beberapa rasio (perbandingan relatif) juga akan disajikan untuk melengkapi analisis yang ada meskipun disadari masih adanya beberapa keterbatasan dalam informasi.

Dalam menghasilkan berbagai produk barang dan jasa, di satu sisi akan menciptakan nilai tambah sementara di sisi lain nilai tambah tersebut akan menjadi sumber penghasilan masyarakat. Yang dimaksud dengan masyarakat di sini terdiri dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah maupun luar negeri. Berdasarkan proses pembentukan dan pemanfaatan nilai tambah ini dapat dipelajari lebih jauh tentang sumber-sumber pendapatan masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga dapat diperhitungkan besaran pendapatan potensial yang dapat diterima masyarakat atau yang disebut sebagai **“Pendapatan Nasional”**.

#### **4.1 PDB (Nominal)**

Agregat ini menjelaskan tentang besaran nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan dalam wilayah ekonomi domestik, masih terkandung nilai penyusutan (konsep bruto). PDB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas” karena menjelaskan tentang kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang digambarkan melalui pendekatan nilai tambah. Proses tersebut dapat berlangsung secara terus menerus dan

berkesinambungan, dengan dukungan berbagai faktor produksi serta sumberdaya alam yang tersedia. Dengan demikian maka nilai tambah yang sebagian besar menggambarkan tentang balas jasa (kompensasi atas) faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal (kapital) dan keahlian, merupakan inti dari analisis PDB di sini.

Di sisi lain PDB menurut penggunaan atau permintaan akhir ini lebih menjelaskan tentang aspek konsumsi dan akumulasi, bukan aspek produksi. Dan dari seri data PDB penggunaan ini akan diturunkan beberapa ukuran deskriptif yang berkaitan dengan PDB maupun variabel pendukung lainnya (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan maka disajikan pula data PDB perkapita yang selama ini digunakan sebagai proksi tentang pola dan perkembangan “**distribusi pemerataan**” dalam masyarakat.

**Tabel 14. Produk Domestik Bruto dan PDB Perkapita  
Tahun 2002—2007**

Uraian	2002	2003	2004	2005	2006*	2007**
Nilai PDB ( <i>Miliar Rp</i> )						
- ADHB	1.821.833,4	2.013.674,6	2.295.826,2	2.774.281,11	3.339.479,6	3.957.403,9
- ADHK 2000	1.505.216,4	1.577.171,3	1.656.516,8	.750.656,1	1.846.654,9	1.963.974,3
PDB perkapita ( <i>Juta Rp</i> )						
- ADHB	8.645,09	9.429,50	10.610,08	12.675,54	15.029,73	17.581,39
- ADHK 2000	7.142,65	7.385,47	7.655,53	7.999,38	8.313,97	8.725,26
Perkembangan PDB perkapita ADHB	109,19	109,07	112,52	119,47	118,57	116,98
Pertumbuhan PDB perkapita ADHK 2000	103,11	103,40	103,66	104,49	103,93	104,95
Jumlah penduduk ( <i>000 org</i> )	210.736	213.551	216.382	218.869	222.192	225.091
Pertumbuhan	101,35	101,34	101,33	101,15	101,52	101,30

*Keterangan : \* sementara \*\* sangat sementara*

PDB perkapita Indonesia juga menunjukkan peningkatan sejalan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk. Apabila PDB (ADHK) meningkat sekitar 5,07 persen (rata-rata 2002 -2007) maka penduduk meningkat sekitar 1,13 persen pada masing-masing tahun tersebut. PDB perkapita pada harga yang berlaku (*current condition*) secara kumulatif

meningkat mulai tahun 2002 dari yang awalnya sebesar 8.645,09 ribu menjadi 17.581,39 ribu rupiah pada tahun 2007. Di mana pada tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006 masing masing tahun meningkat menjadi 7.385,47 ribu; 7.655,53 ribu,; 7.999,38 ribu,; dan 8.313,97 ribu rupiah. Indikator ini menunjukkan bahwa rata-rata secara ekonomi setiap penduduk Indonesia mampu menciptakan Produk Domestik Bruto (nilai tambah) sebesar nilai dimaksud pada masing-masing tahun.

Sementara itu pertumbuhan perkapita secara “riil” juga meningkat dan cenderung semakin meningkat. Pertumbuhan PDB perkapita ini berawal dengan besaran 3,11 persen (2002) menjadi 3,40 persen (2003); 3,66 persen (2004); 4,49 persen (2005); turun menjadi 3,93 persen (2006) dan meningkat lagi menjadi 4,95 persen (2007). Di mana pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk yang rata-rata berada pada kisaran 1,13 persen setiap tahunnya. Dengan demikian maka pertumbuhan perkapita yang terjadi tidak saja secara “riil” tetapi juga secara kualitas.

#### **4.2 Pendapatan Nasional dan Pendapatan Disposabel**

Pendapatan Nasional menggambarkan tentang pendapatan potensial yang diterima seluruh masyarakat dari sumber-sumber penghasilannya yang akan digunakan untuk membiayai kebutuhannya. Kenyataannya pendapatan yang dihasilkan di satu wilayah belum tentu sepenuhnya dapat diterima, digunakan atau dinikmati oleh masyarakat dalam wilayah tersebut, karena kemungkinan ada sebagian yang mengalir keluar wilayah (negeri); Sebaliknya, ada pula pendapatan yang masuk ke wilayah tersebut yang berasal dari wilayah lain. Oleh karena itu konsep “**Pendapatan Nasional**” menjelaskan tentang pendapatan yang diterima oleh masyarakat (residen) dari seluruh balas jasa faktor produksi yang diterimanya, baik yang berasal dari aktivitas ekonomi domestik maupun luar negeri.

“Pendapatan Nasional” yang merupakan refleksi dari ukuran kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat ini, menggambarkan berbagai hal yang berhasil dicapai secara

nasional yang dinyatakan dalam satu satuan moneter, pada satu waktu tertentu (*current condition*). Ukuran keberhasilan tersebut digambarkan melalui kemampuan dalam aktivitas menghasilkan berbagai produk barang dan jasa, menciptakan pendapatan, mengkonsumsi serta penambahan terhadap aset yang dimiliki masyarakat pada satu waktu tertentu. Karena sistem ekonomi negara bersifat terbuka, maka interaksi dan transaksi dengan luar negeri menyebabkan terjadinya aliran pendapatan masuk maupun keluar (*factorial income, net*).

“Pendapatan Nasional” ini diperoleh dari PDB ditambah dengan selisih antara pendapatan faktor produksi yang diterima dari dan yang dibayarkan ke luar negeri. Pendapatan faktor produksi ini merupakan perolehan atas pendapatan atau juga pembayaran yang diwujudkan dalam bentuk balas jasa faktor produksi tenaga kerja (seperti upah dan gaji) dan bukan tenaga kerja (bunga, deviden, royalti serta kompensasi atas pemilikan faktor produksi lainnya). Pendapatan tersebut merupakan sumber pembiayaan hidup (konsumsi) masyarakat. Apabila produk ekonomi yang dihasilkan dikaitkan dengan pola dan perilaku konsumsi masyarakat, maka angka pendapatan nasional digunakan sebagai proksi atas ukuran kemakmuran.

Langkah menghitung Pendapatan Nasional<sup>26</sup> adalah dengan mengurangi PDB (nilai tambah bruto)<sup>27</sup> dengan penyusutan dan pajak tidak langsung (neto). Nilai PDB dikurangi dengan penyusutan disebut sebagai PDN (Produk Domestik Neto), kemudian apabila dikurangi dengan pajak tidak langsung (neto) disebut sebagai PDB atas dasar biaya faktor (*at factor cost*). Dengan demikian maka Produk Domestik Neto (PDN) atas dasar biaya faktor ini identik dengan balas jasa faktor produksi yang diciptakan di dalam wilayah ekonomi domestik (pendapatan domestik). Parameter tersebut apabila diperhitungkan dengan pendapatan faktor yang diterima dikurangi dengan yang dibayarkan ke luar negeri akan sama dengan **Pendapatan Nasional**.

---

26 Mengacu pada konsep SNA '68

27 Atas dasar harga pasar

Dalam kenyataannya, Pendapatan Nasional tersebut belum bisa menggambarkan pendapatan potensial yang bisa diterima oleh masyarakat, masih ada pengeluaran lain yang harus diperhitungkan yaitu transfer berjalan (*current transfer*). Pendapatan Nasional ditambah dengan transfer berjalan (neto) akan sama dengan “**Pendapatan Disposabel**” (*Disposable Income*). Dengan demikian, Pendapatan Disposabel menggambarkan maksimum pendapatan yang tersedia yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk membiayai konsumsinya, atau untuk meningkatkan kekayaannya.

**Tabel 15. PDB, Pendapatan Nasional dan Pendapatan Disposabel Nasional Perkapita Tahun 2002—2007**

Uraian	2002	2003	2004	2005	2006*	2007**
<b>PDB (ADHB) (Miliar Rp)</b>	<b>1.821.833,4</b>	<b>2.013.674,6</b>	<b>2.295.826,2</b>	<b>2.774.281,1</b>	<b>3.339.479,6</b>	<b>3.957.403,9</b>
<i>Minus :</i>						
Penyusutan	91.091,7	100.683,7	114.791,3	138.714,1	166.974,0	197.870,2
<i>Minus :</i>						
Pajak tdk langsung ( <i>neto</i> ) <sup>28</sup>	71.186,3	85.272,2	62.534,0	53.719,3	98.142,7	112.188,8
<i>Plus :</i>						
Pendapatan atas faktor produksi dari LN ( <i>neto</i> ) <sup>29</sup>	-54.513,1	-77.413,9	-105.350,1	-135.000,5	-142.268,9	-156.567,6
<b>Pendapatan Nasional (Miliar Rp)</b>	<b>1.605.042,3</b>	<b>1.750.304,8</b>	<b>2.013.150,8</b>	<b>2.446.847,2</b>	<b>2.932.094,6</b>	<b>3.490.777,3</b>
<i>Plus</i>						
Penerimaan Transfer <sup>30</sup> dari LN ( <i>neto</i> ) <sup>31</sup>	11.792,5	12.775,6	101.875,2	461.105,8	439.782,9	N/A
<b>Pendapatan Disposabel Nasional (Miliar Rp)</b>	<b>1.616.834,9</b>	<b>1.763.080,4</b>	<b>2.115.026,0</b>	<b>2.918.098,4</b>	<b>3.368.725,5</b>	<b>N/A</b>
<i>Perkapita (ribu rupiah)</i>						
- PDB	8.645,1	9.429,5	10.610,1	12.675,5	15.029,7	17.581,4
- Pendapatan Nasional	7.616,4	8.196,2	9.303,7	11.179,5	13.196,2	15.508,3
- Pendapatan Disposabel	7.672,3	8.256,0	9.774,5	13.332,6	15.161,3	N/A
- Kurs 1 US \$ = Rp	9.366,6	8.580,0	8.944,3	9.620,4	9.039,7	9.034,1
<i>Perkapita (US \$)</i>						
- PDB	923,0	1.099,0	1.186,2	1.317,6	1.662,6	1.946,1
- Pendapatan Nasional	813,1	955,3	1.040,2	1.162,1	1.459,8	1.716,6
- Pendapatan Disposabel	819,1	962,2	1.092,8	1.385,9	1.677,2	N/A
Jumlah penduduk (000 org) <sup>32</sup>	210.736	213.551	216.382	218.869	222.192	225.091

Keterangan : \* sementara \*\* sangat sementara

28 Pajak tidak langsung minus subsidi

29 Yang diterima dikurangi yang dibayarkan

30 Transfer berjalan ( *current transfer* )

31 Yang diterima dikurangi yang dibayarkan

32 Berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia 2000 - 2025 (Edisi Revisi)

Dilihat secara umum, selama ini pendapatan nasional nilainya selalu lebih kecil dari nilai nominal PDB. Kondisi ini menunjukkan bahwa selain karena dideduksi oleh pajak tidak langsung (neto) dan penyusutan, pendapatan faktor produksi yang diterima dari luar negeri jauh lebih kecil daripada yang dibayarkan ke luar negeri, sehingga mengakibatkan berkurangnya pendapatan ekonomi domestik. Mengalirnya pendapatan faktor produksi keluar negeri disebabkan oleh ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh negara lain. Namun apabila diperhitungkan transfer maka penerimaan transfer Indonesia selalu dalam kondisi “positif” dalam artian transfer yang diterima dari luar negeri lebih tinggi daripada yang dibayarkan ke luar negeri. Pendapatan Nasional dan Pendapatan Disposabel ini merupakan ukuran yang bersifat universal dan digunakan sebagai indikator perbandingan kemakmuran antar negara.

PDB pada harga berlaku menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, diawali dengan nilai sebesar 1.821.833,4 miliar (2002), menjadi 2.013.674,6 miliar (2003) kemudian menjadi 2.295.826,2 miliar (2004), menjadi 2.774.281,1 miliar (2005) dan menjadi 3.339.479,6 (2006) bahkan sudah mencapai 3.957.403,9 miliar rupiah pada tahun 2007.

Nilai penyusutan juga cenderung meningkat sejalan dengan meningkatnya aktivitas pembentukan modal pada berbagai sektor ekonomi produksi, masing-masing dengan nilai 91.091,7 miliar (2002); 100.683,7 miliar (2003); 114.791,3 miliar (2004); 138.714,1 miliar rupiah (2005) dan 166.974,0 miliar (2006) bahkan pada tahun 2007 sudah mencapai 197.870,2 miliar rupiah. Sementara pajak tidak langsung neto atau pajak yang dibayar dikurangi dengan subsidi yang diterima oleh masyarakat dalam beberapa tahun meningkat. Pada tahun 2002 pajak tidak netto sebesar 71.186,3 miliar meningkat hingga menjadi 85.272,2 miliar pada tahun 2003. Kemudian terjadi penurunan nilai pada tahun 2004 menjadi 62.534,0 miliar dari yang sebesar 85.272,2 miliar rupiah (2003), karena besarnya subsidi pemerintah yang dikeluarkan pada tahun tersebut. Tahun 2005 nilainya turun menjadi

53.719,3 milyar rupiah, kemudian meningkat cukup tinggi menjadi 98.142,7 miliar pada tahun 2006 dan untuk tahun 2007 meningkat cukup tinggi menjadi 197.870,2.

Nilai "**Pendapatan Nasional**" pada masing-masing tahun sebesar 1.605.042,3 miliar (2002); 1.750.304,8 miliar (2003); 2.013.150,8 miliar (2004); 2.456.992,6 miliar rupiah (2005); 2.932.094,0 miliar pada tahun 2006, dan pada tahun 2007 sudah mencapai 3.490.777,3 miliar rupiah. Pendapatan nasional tersebut apabila dikoreksi dengan penerimaan transfer dari luar negeri akan diperoleh Pendapatan Disposabel Nasional. Karena transfer yang diterima dari luar negeri selalu lebih besar dari transfer yang dibayarkan ke luar negeri (dengan posisi selalu positif bertambah), maka menyebabkan adanya aliran devisa masuk dari transaksi tersebut. Penerimaan transfer dari luar negeri mencapai 11.792,5 miliar (2002); dan 12.775,6 miliar (2003); kemudian meningkat cukup tinggi menjadi 101.875,2 miliar pada tahun 2004, 461.105,8 miliar pada tahun 2005, sedangkan pada tahun 2006 turun menjadi 439.782,9 miliar rupiah.

Pendapatan Disposabel (Nasional) secara umum nilainya di atas Pendapatan Nasional juga cenderung semakin meningkat dengan besaran masing-masing tahun adalah 1.616.834,9 miliar (2002); 1.763.080,4 miliar (2003); 2.115.026,0 miliar (2004); 2.918.094,4 miliar (2005). Pada tahun 2006 Pendapatan Disposabel Nasional Indonesia sudah mencapai 3.368.725,5 miliar rupiah. Ukuran perkapita, baik yang menyangkut PDB perkapita, Pendapatan Nasional perkapita serta Pendapatan Disposabel perkapita yang dinyatakan dalam satu satuan rupiah menunjukkan peningkatan; namun apabila dikonversi ke dalam satuan US\$ menunjukkan pola yang agak sedikit berbeda. Dalam rupiah, perkembangan rata-rata PDB perkapita, Pendapatan Nasional perkapita serta Pendapatan Disposabel perkapita setiap tahun juga menunjukkan peningkatan secara optimal. Dilihat dari titik penghujung tahun (2002 dan 2007), PDB perkapita meningkat dari sebesar 8.645,1 ribu rupiah (2002) menjadi 17.581,4 ribu rupiah (2007). Kemudian Pendapatan Nasional

perkapita dari sebesar 7.616,4 ribu rupiah meningkat menjadi sebesar 15.508,3 ribu rupiah. Sedangkan pendapatan disposabel perkapita juga meningkat dari 7.672,3 ribu (2002) menjadi 15.161,3 ribu rupiah (2006).

Rata-rata perkapita dalam US\$ juga mengalami peningkatan, PDB perkapita dari 923,0 US\$ pada tahun 2002 menjadi 1.946,1 US\$ pada tahun 2007. Pendapatan nasional perkapita dari 813,1 US\$ pada tahun 2002 menjadi 1.716,6 US\$ tahun 2007, Pendapatan Disposabel juga meningkat dari 819,1 US\$ (2002) menjadi 1.677,2 US\$ (2006).

#### 4.3. Average Propensity to Consume & Average Propensity to Save

Indikator ini menjelaskan tentang kecenderungan atas hasrat untuk mengkonsumsi (*Average Propensity to Consume/APC*) dan hasrat untuk menabung (*Average Propensity to Save/APS*) yang dinyatakan dalam satu satuan rasio. Dengan demikian dapat diartikan, apabila pendapatan meningkat, tetapi APC menurun, maka APS akan meningkat. Sebaliknya apabila pendapatan meningkat dan APC meningkat, maka APS akan menurun. Proporsi atau rasio yang digunakan di sini merupakan perbandingan nilai antara bagian dari total pendapatan yang digunakan untuk konsumsi dan bagian yang digunakan untuk tabungan. Nilai APC dan APS dapat dihitung dengan menggunakan formula:

$$APS = \frac{S}{Y_d} \qquad APC = \frac{C}{Y_d}$$

Dimana C = Tingkat Konsumsi, S = Tingkat Tabungan, dan  $Y_d$  = Pendapatan disposabel.

Perlu diketahui pula bahwa  $APC + APS = 1$

**Tabel 16. Average Propensity to Consume dan Average Propensity to Save  
Tahun 2002—2007**

Uraian	2002	2003	2004	2005	2006*	2007**
Pendapatan Disposabel Nasional ( $Y_d$ ) (Miliar Rp)	1.616.834,9	1.763.080,4	2.115.026,0	2.918.098,4	3.368.725,5	N/A
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	1.231.964,5	1.372.078,0	1.532.888,3	1.785.596,4	2.092.655,7	2.511.308,2
Total Konsumsi Pemerintah (ADHB) (Miliar Rp)	132,218,8	163,701,4	191.055,6	224.980,5	288.079,9	329.760,1
Total Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)	1,364,183,3	1,535,779,4	1.723.943,9	2.010.576,9	2.380.735,6	2.841.068,3
<b>APC</b>	<b>0,84</b>	<b>0,87</b>	<b>0,82</b>	<b>0,69</b>	<b>0,71</b>	<b>N/A</b>
Tabungan (Miliar Rp)	252.651,6	227.301,0	391.082,1	907.521,5	987.989,9	N/A
<b>APS</b>	<b>0,16</b>	<b>0,13</b>	<b>0,18</b>	<b>0,31</b>	<b>0,29</b>	<b>N/A</b>

Keterangan : \* sementara \*\* sangat sementara

#### 4.4. Perbandingan Penggunaan PDB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi RT di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam penggunaan PDB Indonesia (lebih dari 60 persen), yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Indonesia sebagian besar masih digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

**Tabel 17. Perbandingan PDB Penggunaan untuk Konsumsi Akhir  
Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2002—2007**

Uraian	2002	2003	2004	2005	2006*	2007**
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	1.231.964,5	1.372.078,0	1.532.888,3	1.785.596,4	2.092.655,7	2.511.308,2
Total Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	595.514,0	613.720,8	739.639,3	945.121,8	1.036.316,5	1.161.956,4
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	<b>2,07</b>	<b>2,24</b>	<b>2,07</b>	<b>1,91</b>	<b>2,03</b>	<b>2,16</b>

Keterangan : \* sementara \*\* sangat sementara

Data di atas menunjukkan bahwa produk yang digunakan untuk konsumsi rumah

tangga lebih dari 2,07 kali dari yang dieskpor (tahun 2002), bahkan tahun-tahun setelah itu rasionya semakin meningkat yaitu masing-masing dengan besaran 2,24 (2003), kemudian 2,07 (2004), selanjutnya sedikit menurun pada tahun 2005 menjadi 1,91 dan pada tahun 2006 menjadi 2,03 tetapi pada tahun 2007 naik menjadi 2,16. Bahwa sebagian besar penyediaan (*supply*) domestik diserap untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir rumah tangga, peningkatan rasio yang relatif tajam pada tahun 2003 (2,24) lebih disebabkan oleh penurunan nilai ekspor sementara sebaliknya konsumsi rumah tangga justru meningkat. Secara implisit data tersebut menjelaskan bahwa nilai konsumsi akhir rumah tangga, semakin meningkat dan atau sebaliknya nilai ekspor semakin menurun. Peningkatan dan penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan volume maupun harga. Selain itu peningkatan yang relatif tajam juga disebabkan oleh perbedaan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor.

#### 4.5 Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk tujuan investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Indonesia digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

**Tabel 18. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB  
Tahun 2002—2007**

Uraian	2002	2003	2004	2005	2006*	2007**
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	1.231.964,5	1.372.078,0	1.532.888,3	1.785.596,4	2.092.655,7	2.511.308,2
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	353.967,0	392.788,6	515.381,2	657.625,1	805.470,3	983.830,9
<b>Perbandingan Konsumsi RT thd PMTB</b>	<b>3,48</b>	<b>3,49</b>	<b>2,97</b>	<b>2,72</b>	<b>2,60</b>	<b>2,55</b>

Keterangan : \* sementara \*\* sangat sementara

Seperti halnya rasio konsumsi rumah tangga terhadap ekspor, rasio konsumsi yang sama terhadap PMTB juga cenderung meningkat, dari sebesar 3,48 (2002), dan menjadi 3,49 (2003). Pada tahun 2004 rasio mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 2,97 dan tahun 2005 turun lagi hingga menjadi 2,72, dan tahun 2006 menjadi 2,60 kemudian turun lagi ditahun 2007 menjadi 2,55 karena terjadinya peningkatan nilai investasi secara signifikan, sementara konsumsi akhir rumah tangga meningkat dengan sedikit lebih lambat.

#### 4.6. Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir di sini adalah penggunaan habis berbagai produk barang dan jasa (baik yang berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir di sini meliputi rumah tangga (termasuk LNPRRT) dan pemerintah yang meskipun mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

**Tabel 19. Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDB  
Tahun 2002—2007**

Uraian	2002	2003	2004	2005	2006*	2007**
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)						
a. Rumah tangga	1.231.964,5	1.372.078,0	1.532.888,3	1.785.596,4	2.092.655,7	2.511.308,2
b. Pemerintah	132.218,8	163.701,4	191.055,6	224.980,5	288.079,9	329.760,1
Jumlah	1.364.183,3	1.535.779,4	1.723.943,9	2.010.576,9	2.380.735,6	2.841.068,3
PDB (ADHB) (Miliar Rp)	1.821.833,4	2.013.674,6	2.295.826,2	2.774.281,1	3.339.479,6	3.957.403,9
<b>Proporsi</b>	<b>74,88</b>	<b>76,27</b>	<b>75,09</b>	<b>72,47</b>	<b>71,29</b>	<b>71,79</b>

\* sementara \*\* sangat sementara

Sebagian besar produk barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan rumah tangga dan pemerintah untuk konsumsi akhir (lebih dari 70 persen). Dan proporsi ini cenderung semakin meningkat sejalan dengan peningkatan yang terjadi pada konsumsi RT maupun pemerintah, 74,88 persen (2002) menjadi 76,27

(2003), kemudian berturut-turut 75,09 persen (2004), Sedangkan proporsi pada tahun 2005, 2006 dan 2007 turun hingga mencapai 72,47 persen, 71,29 persen dan 71,79 persen. Dalam hal ini produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir yang meliputi PMTB ataupun yang diekspor memiliki peran yang relatif kecil.

#### 4.7 Perbandingan Ekspor terhadap PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik tetapi diperdagangkan ke luar negeri. Untuk menghasilkan produk yang diekspor pasti menggunakan kapital (PMTB), sementara di sisi lain sebagian dari barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

**Tabel 20. Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2002—2007**

Uraian	2002	2003	2004	2005	2006*	2007**
Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	595.514,0	613.720,8	739.639,3	945.121,8	1.036.316,5	1.161.956,4
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	353.967,0	392.788,6	515.381,2	655.854,3	806.470,3	983.830,9
<b>Rasio Ekspor terhadap PMTB</b>	<b>1,68</b>	<b>1,56</b>	<b>1,44</b>	<b>1,42</b>	<b>1,29</b>	<b>1,18</b>

Keterangan : \* sementara \*\* sangat sementara

Ekspor mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada PMTB bahkan dengan kecenderungan yang semakin meningkat sebagaimana digambarkan pada data di atas. Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk yang untuk diekspor) dibutuhkan tersedianya sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital dari impor). Besaran rasio masing-masing tahun adalah sebagai berikut: 1,68 (tahun 2002); 1,56 (tahun 2003); 1,44 (tahun 2004); 1,42 (tahun 2005), 1,29 (tahun 2006) dan pada tahun 2007 turun menjadi 1,18. Penurunan rasio di antaranya disebabkan oleh kenaikan PMTB yang relatif lebih pesat dibandingkan dengan kenaikan ekspor;

#### 4.8. Perbandingan PDB terhadap Impor

Memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDB terhadap produk yang dihasilkan oleh negara lain. Besar kecilnya ketergantungan ditunjukkan melalui besaran rasio, apabila angka rasionya besar berarti ketergantungan semakin besar, sebaliknya apabila angka rasionya kecil berarti ketergantungan terhadap produk impor tidak terlalu kuat.

**Tabel 21. Rasio PDB terhadap Impor Tahun 2002—2007**

Uraian	2002	2003	2004	2005	2006*	2007**
PDB (ADHB) (Miliar Rp)	1.821.833,4	2.013.674,6	2.295.826,2	2.774.281,1	3.339.479,6	3.957.403,9
Total Impor (ADHB) (Miliar Rp)	480.815,4	465.940,9	632.376,1	830.083,4	855.587,8	1.002.507,9
<b>Rasio Impor terhadap PDB</b>	<b>3,79</b>	<b>4,32</b>	<b>3,63</b>	<b>3,42</b>	<b>3,84</b>	<b>3,84</b>

Keterangan : \* sementara \*\* sangat sementara

Rasio PDB terhadap impor tahun 2002 ke 2003 menunjukkan peningkatan dari 3,79 menjadi 4,32, kemudian pada tahun 2004 dan 2005 turun lagi menjadi 3,63 dan 3,42; dan tahun 2006 meningkat kembali menjadi 3,84 dan pada tahun 2007 tidak ada peningkatan. Rasio tertinggi yang terjadi pada tahun 2003 (4,32) lebih disebabkan oleh peningkatan PDB, sedangkan sebaliknya nilai impor justru menurun. Peningkatan rasio menunjukkan berkurangnya ketergantungan PDB terhadap produk impor, terutama sejak terjadinya penurunan nilai impor pada tahun 2002 dan 2003. Ketika pada tahun 2003 nilai PDB meningkat yang juga diikuti oleh peningkatan impor menyebabkan rasio PDB terhadap impor menjadi lebih kecil (3,63).

#### 4.9. Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan

Berdasarkan seri data yang ada dapat ditunjukkan bahwa selama ini ekonomi

Indonesia masih selalu ditopang oleh produk-produk yang berasal dari impor. Ketergantungan ini dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*) yang selalu menunjukkan ketidakseimbangan tersebut sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 22. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan  
Tahun 2002—2007**

Uraian	2002	2003	2004	2005	2006*	2007**
<b>Total Penyediaan</b>						
PDB (ADHB) (Miliar Rp)	1.821.833,4 (79,12)	2.013.674,6 (81,21)	2.295.826,2 (78,40)	2.774.281,1 (76,97)	3.339.479,6 (79,60)	3.957.403,9 (79,79)
Total nilai Impor ADHB (Miliar Rp)	480.815,4 (20,88)	465.940,9 (18,79)	632.376,1 (21,60)	830.083,4 (23,03)	855.587,8 (20,40)	1.002.507,0 (20,21)
<b>Total Permintaan Akhir<sup>33</sup></b> (Miliar Rp)	2.302.648,8 (100 %)	2.479.615,5 (100 %)	2.928.202,3 (100 %)	3.604.364,5 (100 %)	4.195.067,2 (100 %)	4.959.910,9 (100 %)

Keterangan : \* sementara \*\* sangat sementara

Hal lain yang menarik untuk dicermati adalah bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar negeri, dengan rentang 18 sampai dengan 23 persen. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 80 persen dari selisih hasil produksi domestik. Dalam kurun waktu tersebut, tendensi permintaan (akhir) masyarakat terus meningkat dari sebesar 2.302.648,2 miliar rupiah (2002), meningkat lagi menjadi 2.479.615,5 miliar rupiah (2003), kemudian menjadi 2.928.202,3 miliar rupiah (2004) menjadi 3.604.364,5 miliar rupiah (2005) dan menjadi 4.195.067,2 miliar rupiah tahun 2006. Tahun 2007 permintaan akhir masyarakat sudah mencapai nilai sebesar 4.959.910,9 miliar rupiah.

Di sisi lain “penyediaan” produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik masing-masing sebesar 1.821.833,4 miliar rupiah (2002); 2.013.674,6

<sup>33</sup> Termasuk diskrepansi statistik

miliar rupiah (2003); 2.295.826,2 miliar rupiah (2004); 2.774.281,1 miliar rupiah (2005); 3.338.195,7 miliar rupiah (2006) serta 3.957.403,9 miliar rupiah. Karena produk domestik tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka diimpor berbagai produk barang dan jasa dengan nilai masing-masing tahun sebesar 480.815,4 miliar rupiah (2002); 465.940,9 miliar rupiah (2003); 632.376,1 miliar rupiah (2004); 830.083,4 miliar rupiah (2005), 855.587,8 miliar rupiah (2006) dan 1.002.507,9 miliar rupiah.

#### **4.10. Neraca Perdagangan (*Trade Balance*)**

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri (non residen) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep selisih antara nilai ekspor dengan nilai impor disebut sebagai “**Ekspor Neto**”, apabila nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor disebut “**Surplus**”, dan sebaliknya disebut “**Defisit**” apabila nilai ekspor lebih kecil dari nilai impor. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kemajuan ekonomi suatu negara di antaranya juga ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Rasio di sini tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu negara sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

**Tabel 23. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa  
Tahun 2002—2007**

Uraian	2002	2003	2004	2005	2006*	2007**
Nilai Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	595.514,0	613.720,8	739.639,3	945.121,8	1.036.316,5	1.161.956,4
Nilai Impor (ADHB) (Miliar Rp)	480.815,4	465.940,9	632.376,1	830.083,4	855.587,8	1.002.507,9
Net ekspor (X – M) (Miliar Rp)	114.698,6	147.779,9	107.263,2	115.038,4	180.728,7	159.448,5
Rasio ekspor thdp Impor	<b>1,24</b>	<b>1,32</b>	<b>1,17</b>	<b>1,14</b>	<b>1,21</b>	<b>1,16</b>

Keterangan : \* sementara \*\* sangat sementara

Selama periode 2002—2007 posisi perdagangan barang dan jasa dengan luar negeri selalu menunjukkan nilai positif, atau neraca perdagangan barang dan jasa Indonesia selalu dalam posisi “surplus”. Nilai ekspor yang lebih besar daripada impor menyebabkan adanya aliran devisa masuk, yang dalam konteks berbeda disebut sebagai “**tabungan luar negeri**”. Surplus perdagangan Indonesia yang terjadi antara tahun 2002 sampai dengan 2007 tercatat sebesar 114.698,6 miliar (2002); 147.779,9 miliar (2003); 107.263,2 miliar (2004); 115.038,9 miliar (2005); 180.728,7 (2006) dan untuk sementara pada tahun 2007 menjadi 159.448,5 miliar rupiah. Meskipun sempat terjadi penurunan nilai surplus pada tahun 2004, tetapi secara umum surplus perdagangan masih menunjukkan adanya peningkatan.

Sementara rasio ekspor terhadap impor cenderung menunjukkan penurunan dari yang sebesar 1,24 (2002) menjadi sekitar 1,16 (2007), kecuali tahun 2003 yang mencapai sebesar 1,32. Peningkatan ini lebih disebabkan karena peningkatan pada nilai ekspor (dari sebesar 595.514,0 miliar menjadi 613.720,8 miliar), sedang sebaliknya nilai impor menurun dari 480.815,4 miliar menjadi 465.940,9 miliar rupiah.

#### **4.11. Rasio Perdagangan Internasional (RPI)**

Rasio ini menunjukkan perbandingan yang terjadi pada kegiatan perdagangan

internasional apakah didominasi oleh ekspor ataukah impor. Formulasinya diperoleh dengan menghitung selisih antara ekspor dikurangi impor dibagi dengan jumlah ekspor dan impor. Koefisien RPI berkisar antara -1 sampai dengan + 1 (  $-1 < RPI < +1$  ). Artinya jika RPI berkisar antara minus 1 maka perdagangan internasional didominasi oleh impor, sedangkan apabila berkisar antara positif 1 maka perdagangan internasional didominasi oleh transaksi ekspor.

**Tabel 24. Rasio Perdagangan Internasional Tahun 2002—2007**

Uraian	2002	2003	2004	2005	2006*	2007**
Nilai Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	595.514,0	613.720,8	739.639,3	945.121,8	1.036.316,5	1.161.956,4
Nilai Impor (ADHB) (Miliar Rp)	480.815,4	465.940,9	632.376,1	830.083,4	855.587,8	1.002.507,9
(X – M) (Miliar Rp)	114.698,6	147.779,9	107.263,2	115.038,4	180.728,7	159.448,5
(X +M) (Miliar Rp)	1.076.329,4	1.079.661,7	1.372.015,4	1.775.205,2	1.891.904,3	2.164.464,3
R P I	<b>0,11</b>	<b>0,14</b>	<b>0,08</b>	<b>0,06</b>	<b>0,10</b>	<b>0,07</b>

Keterangan : \* sementara \*\* sangat sementara

Data di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tersebut posisi nilai ekspor selalu lebih tinggi daripada nilai impor Indonesia. Tren nilai ekspor terus meningkat dari 595.514,0 miliar rupiah pada tahun 2002 yang pada akhirnya menjadi 1.161.956,4 miliar pada tahun 2007. Begitu pula dengan tren impor yang mempunyai pola yang hampir sama dengan ekspor, cenderung meningkat tetapi penurunan secara nilai terjadi pada tahun 2003.

Rasio Perdagangan Internasional Indonesia dalam kurun waktu tersebut mengindikasikan bahwa perdagangan Internasional Indonesia selalu didominasi oleh kegiatan ekspor, meskipun cenderung semakin melemah (rasio semakin mengecil). Pada tahun 2002 RPI yang sebesar 0,11 mulai menunjukkan peningkatan secara gradual menjadi 0,14 (2003), kemudian pada tahun 2003, namun setelah itu mulai turun kembali menjadi 0,08 (2004) kemudian 0,06 (2005) dan pada tahun 2006 meningkat kembali menjadi 0,10 dan

mulai turun kembali pada tahun 2007 menjadi 0,07.

#### 4.12. Nilai Tukar Perdagangan Luar Negeri

Nilai perdagangan luar negeri (*Term of Trade*) sangat dipengaruhi oleh perkembangan harga ekspor maupun harga impor yang mencakup komoditas barang maupun jasa. Ada dua parameter yang dibahas berikut ini yaitu Indeks Nilai Tukar ( $I_{NT}$ ) dan Kapasitas Impor ( $K_M$ ) yang masing-masing menjelaskan tentang daya beli dan kemampuan mengimpor berdasarkan nilai ekspor. Indeks nilai tukar diperoleh dengan cara membagi indeks implisit (harga) ekspor ( $II_X$ ) dengan indeks implisit (harga) impor ( $II_M$ ). Sedangkan  $K_M$  diperoleh dengan cara membagi nilai ekspor (ADHB) dengan indeks implisit impor, dengan hasil sebagai berikut:

Kemampuan mengimpor pada tahun 2002 adalah 595.514,0 miliar rupiah. Kemudian kemampuan impor meningkat menjadi 613.720,8; 739.639,3 dan 945.121,8 miliar rupiah pada tahun 2003, 2004 dan 2005, dan pada tahun 2006 kemampuan impor meningkat menjadi sebesar 1.036.316,5 miliar rupiah. Serta 1.161.956,4 miliar ruipiah pada tahun 2007.

**Tabel 25. Nilai Tukar Perdagangan Luar Negeri Tahun 2002—2007**

Uraian	2002	2003	2004	2005	2006*	2007**
Nilai Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	595.514,0	613.720,8	739.639,3	945.121,8	1.036.316,5	1.161.956,4
Indeks Implisit Ekspor	105,18	102,37	108,67	119,09	119,36	123,90
Indeks Implisit Impor	113,86	108,64	116,42	129,74	123,18	132,55
<b>Indeks nilai tukar (<math>I_{NT}</math>)</b>	<b>92,38</b>	<b>94,23</b>	<b>93,34</b>	<b>91,79</b>	<b>96,90</b>	<b>93,47</b>
<b>Kapasitas Impor</b>	<b>523,023.0</b>	<b>564,912.4</b>	<b>635,319.8</b>	<b>728,473.7</b>	<b>841,302.6</b>	<b>876,617.4</b>

Keterangan : \* sementara \*\* sangat sementara

#### 4.13. Rasio Pendapatan Nasional (PN) Terhadap PDB

Perbandingan antara Pendapatan Nasional yang dihasilkan terhadap Nilai Tambah (PDB pendekatan sektoral) sebagai sumber terciptanya pendapatan bagi masyarakat. Berbagai sektor produksi mengalokasikan balas jasa faktor faktor produksi kepada pemilik faktor produksi yang sebagian besar dimiliki oleh rumah tangga. Untuk mendapatkan gambaran pendapatan yang secara potensial akan diterima oleh masyarakat maka unsur-unsur yang bukan merupakan faktor pendapatan harus dikeluarkan dari perhitungan, seperti halnya penyusutan dan pajak tidak langsung (neto), yang hasilnya kemudian disebut sebagai pendapatan domestik. Kemudian untuk menghitung pendapatan nasional, maka pendapatan domestik tersebut harus ditambah dengan pendapatan faktor yang masuk setelah dikurangi dengan pendapatan faktor yang keluar. Sementara itu untuk mendapatkan pendapatan yang benar-benar diterima (atau siap dibelanjakan) maka pendapatan nasional tersebut harus ditambah dengan penerimaan transfer setelah dikurangi dengan pembayaran transfer (khusus untuk transfer berjalan).

**Tabel 26. Rasio Pendapatan Nasional dan Pendapatan Disposabel Terhadap PDB  
Tahun 2002—2007**

Uraian	2002	2003	2004	2005*	2006**	2007**
PDB	1.821.833,4	2.013.674,6	2.295.826,2	2.784.960,4	3.338.195,7	3.957.703,7
Pendapatan Nasional (PN)	1.605.042,3	1.750.304,8	2.013.150,8	2.446.847,2	2.932094,0	3.490.777,3
Rasio PN/PDB	88,10	86,92	87,69	87,86	87,83	88,20
Pendapatan Disposabel (PD)	1.616.834,9	1.763.080,4	2.115.026,0	2.918.098,4	3.368.725,5	N/A
Rasio PD/PDB	88,75	87,56	92,12	104,78	100,91	N/A

Keterangan : \* sementara \*\* sangat sementara

Data selanjutnya menunjukkan bahwa dari nilai tambah yang dihasilkan setiap tahunnya ada sebagian yang tidak diterima oleh masyarakat. Sebagian pendapatan faktor produksi lebih

banyak yang dibayarkan ke luar negeri daripada yang diterima dari luar negeri (posisi defisit). Sementara itu penerimaan transfer dari luar negeri lebih besar dari pada transfer yang dibayarkan ke luar negeri (posisi surplus), sehingga menyebabkan adanya penambahan pendapatan masyarakat di wilayah domestik.

Pada tahun 2002 dari PDB yang dihasilkan sebesar 1.821.833,4 miliar rupiah ada sebesar 88,10 persen yang menjadi pendapatan nasional dan 88,75 persen yang menjadi pendapatan disposabel. Setelah tahun 2002, meskipun pendapatan nasional maupun pendapatan disposabel mengalami peningkatan secara nominal setiap tahunnya, tetapi proporsinya cenderung menurun. Pendapatan Nasional meningkat dari yang sebesar 1.605.042,3 miliar (2002); 1.750.304,8 miliar (2003); 2.013.150,8 miliar (2004); 2.446.847,2 miliar (2005); 2.928.942 miliar rupiah 2006 dan menjadi 3.490.777,3 pada tahun 2007.

Sementara itu pendapatan disposabel juga meningkat secara nominal dari 1.616.834,9 miliar rupiah (2002) menjadi 3.368.725,5 miliar rupiah pada tahun 2006, dengan proporsi terhadap PDB masing-masing sebesar 88,75 persen (2002) menjadi 100,91 persen pada tahun 2006.

#### **4.14. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)**

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan tentang nisbah investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan sejumlah investasi tersebut. Secara tepatnya ICOR diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal berbentuk fisik yang dibuat oleh manusia dari berbagai sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang-ulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah"

Dengan menggunakan ukuran rasio ini maka ICOR mampu menjelaskan

perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit.

Formula:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Dimana:  $I_t$  = PMTB tahun ke t  
 $Y_t$  = Output tahun ke t  
 $Y_{t-1}$  = Out tahun ke t-1

**Tabel 27. Incremental Capital Output Ratio  
Tahun 2002—2007**

Uraian	2002	2003	2004	2005	2006*	2007**
PDB (ADHB) (miliar rupiah)	1.821.833,4	2.013.674,6	2.295.826,2	2.784.960,4	3.338.195,7	3.957.703,7
Perubahan (miliar rupiah)	175.511,4	191.841,2	282.151,6	489.134,2	553.235,3	619.508,0
PMTB (ADHK 2000) (miliar Rp)	307.584,6	309.431,1	354.865,7	393.500,5	403.161,9	440.078,2
ICOR	1,75	1,61	1,26	0,80	0,73	0,60

Keterangan : \* sementara \*\* sangat sementara

Secara umum data di atas menunjukkan bahwa besaran ICOR penurunan dari sebesar 1,75 (2002) kemudian berturut-turut menjadi 1,61 (2003); 1,26 (2004) hingga turun menjadi 0,80 (2005), 0,73 (2006) dan 0,60 (tahun 2007) . Kondisi ini menunjukkan bahwa di Indonesia kebutuhan akan investasi untuk meningkatkan output menjadi semakin kecil, yang berarti pula bahwa kapasitas dalam proses produksi menunjukkan semakin efisien.

<https://www.bps.go.id>

Halaman ini dibiarkan kosong

## BAB V METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

PDB menurut penggunaan (*Use of GDP*) disebut juga sebagai PDB menurut permintaan akhir (*final demand*) atau PDB menurut pengeluaran (*GDP expenditure*). Dilihat dari sisi permintaan, PDB merupakan jumlah seluruh nilai permintaan produk barang dan jasa oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhirnya. Disebut sebagai permintaan akhir karena produk tersebut tidak digunakan untuk tujuan proses lebih lanjut, tetapi habis digunakan baik untuk konsumsi, investasi maupun diekspor ke negara lain. Barang dan jasa tersebut merupakan produk domestik yang dihasilkan (*output*) di wilayah domestik Indonesia maupun yang berasal dari luar negeri (impor).

Sedangkan jika dilihat dari sisi pengeluaran, PDB merupakan jumlah nilai pengeluaran (*expenditure*) seluruh institusi (masyarakat) untuk pembelian berbagai produk barang dan jasa yang berasal dari produksi domestik maupun dari impor. Institusi-institusi tersebut secara garis besar meliputi: rumah tangga (termasuk lembaga nir-laba yang melayani rumah tangga/LNPRT) perusahaan (korporasi) serta pemerintah. Dengan demikian maka PDB menurut pengeluaran ini dapat digolongkan mengikuti struktur pelaku serta kegiatan ekonominya ke dalam empat kelompok utama pengeluaran yaitu konsumsi (akhir) rumah tangga, konsumsi (akhir) pemerintah, investasi fisik (pembentukan modal tetap bruto) dan ekspor. Apabila dilihat dari pendekatan ini menjelaskan hubungan antara pengeluaran dengan penggunaan berbagai produk barang dan jasa dari hasil produksi domestik. Termasuk juga dalam komponen ini komponen perubahan inventori, dan perbedaan statistik yang dihitung dari selisih total PDB sektoral dengan total PDB penggunaan<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> diperlakukan sebagai komponen residual

Penghitungan PDB menurut penggunaan ini disajikan dalam dua bentuk penilaian yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan 2000 (ADHK). Penghitungan atas dasar harga berlaku adalah penghitungan terhadap semua komponen PDB penggunaan yang dinilai atas dasar harga pada masing-masing tahun (tahun berjalan). Sedangkan penghitungan atas dasar harga konstan 2000 adalah penghitungan terhadap semua komponen PDB yang dinilai berdasarkan harga pada tahun dasar (2000). PDB Indonesia dengan menggunakan harga berlaku menjelaskan tentang perkembangan nilai (nominal) atas perubahan volume berbagai produk barang dan jasa yang dipadukan secara bersama-sama dengan perkembangan harga produk tersebut. Sedangkan harga konstan adalah penilaian PDB secara “riil” yaitu dengan mengalikan volume pada tahun berjalan dengan harga pada satu tahun dasar (2000). Pada kondisi tersebut pengaruh kenaikan harga sudah dihilangkan, sehingga PDB benar-benar hanya menggambarkan perubahan volume (kuantum) saja.

Secara umum penghitungan PDB (ADHK) pada seluruh komponen penggunaan menggunakan metode “deflasi” yaitu dengan cara membagi nilai PDB (ADHB) dengan indeks harga yang sesuai. Belum tersedianya data volume<sup>35</sup> konsumsi akhir pada hampir seluruh komponen PDB secara baik, rinci, lengkap dan berkesinambungan menyebabkan pendekatan tersebut masih digunakan sampai saat ini.

Selain PDB menurut penggunaan, dalam publikasi ini juga disajikan data agregat lainnya yang dapat diturunkan dari PDB, di antaranya “**Pendapatan Nasional**” dan “**Pendapatan Disposabel**”, bahkan juga data agregat lain di antaranya seperti PDB dan Pendapatan perkapita, konsumsi rumah tangga perkapita, konsumsi pemerintah, rasio ekspor terhadap impor, neraca perdagangan, dan sebagainya. Unsur yang membedakan PDB dengan pendapatan disposabel nasional adalah “Pendapatan Faktor Produksi (neto)” dan “Transfer Berjalan (neto)” yang turut memberi kontribusi dalam pendapatan masyarakat.

---

<sup>35</sup> data volume yang tersedia hanya untuk ekspor dan impor barang

Pendapatan faktor produksi neto merupakan selisih antara pendapatan faktorial (faktor produksi) yang diterima dari luar negeri dikurangi dengan yang dibayarkan ke luar negeri.

Karena dalam PDB masih termasuk penyusutan dan pajak tidak langsung (neto) atau yang disebut sebagai nilai tambah bruto atas dasar harga pasar. Untuk menghitung sumber pendapatan masyarakat yang berasal dari faktor produksi yang dimilikinya maka kedua elemen tersebut harus dikeluarkan. Dengan demikian maka nilai tambah yang terbentuk di sini disebut sebagai nilai tambah neto atas dasar biaya faktor, atau secara konsep disebut pula sebagai balas jasa faktor produksi. Pada gilirannya balas jasa tersebut akan menjadi sumber pendapatan masyarakat (di wilayah domestik) yang apabila ditambah dengan pendapatan atas faktor produksi dari luar negeri (neto) dikenal dengan terminologi “Pendapatan Nasional”.

Dengan demikian maka angka-angka produk domestik bruto perkapita, pendapatan nasional perkapita, pendapatan disposabel perkapita maupun agregat lainnya perkapita merupakan angka-angka yang diturunkan dari perhitungan produk domestik bruto berikut dengan komponennya, baik ADHB maupun ADHK 2000. Untuk memperoleh angka perkapita, maka masing masing data agregat tersebut dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun<sup>36</sup> yang penyebarannya dianggap mewakili.

## 5.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Mencakup berbagai jenis pengeluaran rumah tangga (termasuk LNPRT) atas pembelian berbagai produk barang dan jasa yang berasal dari produk domestik maupun impor, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhirnya. Fungsi rumah tangga di sini adalah sebagai konsumen akhir (*final demand*). Sedangkan secara spesifik yang dimaksud dengan rumah tangga di sini adalah sekelompok (kecil) orang yang bertempat tinggal dan dengan menggunakan akomodasi serta fasilitas yang sama, mengumpulkan

---

<sup>36</sup> merupakan jumlah penduduk awal tahun ditambah jumlah penduduk akhir tahun kemudian dibagi dengan dua.

pendapatan serta memiliki kekayaan bersama, serta mengkonsumsi produk (barang dan jasa) secara bersama (kolektif).

**a. Definisi konsep**

Pengeluaran konsumsi rumah tangga terdiri dari pengeluaran atas pembelian berbagai produk barang dan jasa oleh rumah tangga (termasuk lembaga swasta nirlaba yang melayani rumah tangga) dengan tujuan dikonsumsi selama periode satu tahun. Rumah tangga yang dimaksud adalah rumah tangga yang berada pada wilayah domestik suatu negara, baik penduduk negara tersebut maupun penduduk negara lain yang sudah merupakan residen negara Indonesia. Penduduk negara lain dianggap sebagai residen Indonesia bila mereka telah tinggal di Indonesia lebih dari satu tahun, kecuali mereka yang termasuk sebagai anggota korps diplomatik, staf kedutaan asing (tidak termasuk staf lokal), perwakilan negara-negara lain. Sedangkan yang dimaksud dengan lembaga swasta nirlaba yaitu lembaga swasta yang utamanya adalah untuk melayani rumah tangga dan kegiatannya tidak bertujuan untuk mencari keuntungan.

Secara garis besar pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Pengeluaran makanan di antaranya terdiri dari bahan makanan (produk-produk pertanian dan hasil industri pengolahan), minuman, rokok, tembakau dan sebagainya; Sedangkan pengeluaran untuk bukan makanan di antaranya meliputi pembelian barang tahan lama, pakaian, asesoris, bahan bakar, telepon, transportasi, biaya kesehatan, jasa-jasa lainnya, barang keperluan pribadi dan berbagai pengeluaran lainnya. Pengeluaran-pengeluaran tersebut baik makanan maupun bukan makanan merupakan pengeluaran untuk tujuan konsumsi, tidak untuk keperluan usaha rumah tangga. Jika seandainya ada sebagian dari pengeluaran tersebut digunakan untuk keperluan usaha, maka nilai seluruh pengeluaran tersebut harus dikurangi dengan besarnya nilai yang digunakan untuk keperluan usaha tersebut.

Pembelian rumah dan perbaikan besar untuk rumah tidak termasuk sebagai bagian dari pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, melainkan dimasukkan dalam pembentukan modal. Sedangkan pengeluaran atas rumah yang ditempati seperti sewa rumah (termasuk imputasi atas sewa rumah milik sendiri), perbaikan ringan, rekening air, listrik, telepon, dan lain-lain termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga.

#### **b. Metode Penghitungan dan Sumber Data**

Karena keterbatasan data yang tersedia, maka untuk memperkirakan besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga digunakan dua pendekatan estimasi, yaitu “metode langsung” dan “metode tidak langsung (penilaian harga eceran)”. Metode langsung digunakan untuk memperoleh nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga secara keseluruhan melalui pencatatan pengeluaran rumah tangga. Data pokok yang digunakan adalah data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional). Dari survei tersebut diperoleh data berupa nilai konsumsi perkapita seminggu untuk kelompok makanan, dan nilai konsumsi perkapita sebulan untuk kelompok bukan makanan. Data tersebut berdasarkan pengeluaran pada harga yang berlaku, rata-rata setiap minggu. Kemudian dari data Susenas tersebut dibuat perkiraan nilai pengeluaran rumah tangga selama satu tahun. Untuk memperoleh perkiraan atas dasar harga konstan maka nilai pengeluaran tersebut dideflasi dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK). Metode penilaian harga eceran digunakan untuk melengkapi kekurangan informasi pada pendekatan metode langsung. Metode ini dipakai apabila informasi yang tersedia hanya mencakup konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum. Nilai konsumsi rumah tangga dapat diperoleh dengan jalan mengalikan kuantum dengan harga eceran untuk setiap jenis barang yang dikonsumsi.

Penghitungan atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara “deflasi” yaitu dengan membagi nilai konsumsi akhir rumah tangga atas dasar harga berlaku dengan indeks harga

yang sesuai atau yang mempunyai korelasi dengan jenis-jenis barang konsumsinya (dirinci menurut kelompok). Pada umumnya indeks harga yang digunakan adalah indeks harga konsumen (IHK) yang datanya disusun dan diterbitkan oleh BPS secara regular.

## 5.2 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Mencakup pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa baik yang berasal dari produk domestik maupun impor. Pemerintah merupakan institusi yang juga menghasilkan produk tetapi pada akhirnya akan digunakan sendiri (*own account consumption*). Sebagian besar produk pemerintah yang berbentuk jasa layanan terhadap masyarakat pada akhirnya akan dikonsumsi sendiri oleh pemerintah dengan maksud untuk direlokasikan kembali dalam bentuk transfer (hibah) kepada masyarakat.

### a. Definisi konsep

Pemerintah yang dalam konteks PDB di sini berfungsi sebagai konsumen akhir kegiatannya mencakup penyelenggaraan sistem administrasi negara yang dilaksanakan oleh departemen-departemen, lembaga bukan-departemen, pemerintah daerah tingkat I, pemerintah daerah tingkat II serta pemerintah desa. Pengeluaran konsumsi pemerintah mencakup pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang (termasuk biaya perjalanan, pemeliharaan dan pengeluaran lain yang bersifat rutin); tidak termasuk di sini penerimaan dari barang dan jasa yang dihasilkan sendiri. Transaksi atau jenis-jenis pengeluaran pokok pemerintah meliputi:

#### i. *Pengeluaran untuk belanja barang*

yaitu pengeluaran untuk pembelian barang-barang yang tidak tahan lama, artinya produk yang habis dipakai dalam proses produksi, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah di dalam negeri maupun di luar negeri. Data diperoleh dari belanja rutin

pemerintah ditambah dengan belanja pembangunan yang merupakan bagian dari pengeluaran rutin, seperti halnya pengeluaran pembangunan untuk pertahanan keamanan, proyek pendidikan, dan lain-lain.

ii. ***Pengeluaran untuk belanja pegawai***

yaitu pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bagi pegawai pemerintah dalam bentuk upah dan gaji yang berupa uang (tunai) maupun barang, termasuk berbagai tunjangan yang diberikan seperti: iuran dan jaminan sosial, iuran dana pensiun, Asuransi kecelakaan, tabungan hari tua, dan sejenisnya. Data diperoleh dari pencatatan belanja rutin pemerintah ditambah dengan perkiraan upah yang dibayarkan melalui belanja pembangunan.

iii. ***Penyusutan barang modal***

yaitu merupakan perkiraan imputasi atas nilai penyisihan barang modal (kapital) pemerintah karena menurunnya nilai kapital tersebut secara ekonomis. Angka penyusutan ini diperkirakan sebesar 5 persen dari total nilai pembentukan modal tetap pemerintah, baik untuk estimasi harga berlaku maupun harga konstan.

Sedangkan penerimaan pemerintah yang harus dikeluarkan dari komponen konsumsi akhir ini adalah

i. ***Penerimaan dari jasa***

yaitu penerimaan dari kegiatan jasa layanan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat, yang meliputi:

- Penerimaan pendidikan
- Penerimaan dari rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya
- Penjualan karcis dan biaya masuk ke tempat hiburan (yang diusahakan oleh

pemerintah)

- Penerimaan jasa tenagakerja dan pekerjaan
- Penerimaan proyek-proyek
- Penerimaan sebesar 50 persen dari sewa, penggantian benda-benda tidak bergerak dan benda-benda bergerak
- Penerimaan sebesar 50 persen dari penerimaan bukan pajak luar negeri
- Penerimaan sebesar 40 persen dari penerimaan lain-lain pada penerimaan bukan pajak pemerintah pusat

## ii. Penerimaan dari produksi barang

yaitu penerimaan dari penjualan berbagai jenis barang yang diproduksi oleh semua unit pemerintahan umum, yang meliputi:

- Penjualan hasil pertanian/perkebunan
- Penjualan hasil peternakan
- Penjualan hasil perikanan
- Penjualan hasil obat-obatan, vaksinasi, dan hasil farmasi lainnya
- Penerimaan penggantian dokumen pelanggan
- Penjualan penerbitan, potret, film, poster, gambar dan peta
- Penerimaan hasil penjualan air minum dari proyek pembangunan
- Penerimaan sebesar 50 persen dari sewa, penggantian benda-benda tidak bergerak dan benda-benda bergerak
- Penerimaan sebesar 20 persen dari penerimaan lain-lain pada penerimaan bukan pajak pemerintah pusat

Data tentang komposisi penerimaan pemerintah pusat diperoleh dari rincian penerimaan bukan pajak (APBN). Sedangkan data penerimaan pemerintah daerah diperoleh dari penerimaan produksi barang dan jasa, (Statistik Keuangan Pemerintah

Daerah/Tingkat I dan Tingkat II, BPS).

#### **b. Metode Penghitungan dan Sumber data**

Penghitungan seluruh pendapatan maupun pengeluaran pemerintah pusat maupun daerah diperoleh dari hasil pencatatan administrasi pemerintah yang tersedia secara kontinyu dan berkesinambungan. Sumber data utama yang digunakan di sini adalah realisasi belanja rutin dan pembangunan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan untuk pemerintah pusat. Sedangkan data pengeluaran pemerintah (daerah tingkat I, II dan desa) diperoleh dari Survei Keuangan Daerah Tingkat I, Tingkat II dan desa, yang diselenggarakan oleh BPS. Penghitungan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan dilakukan dengan cara :

- i. Mendeflasi nilai belanja barang atas dasar harga berlaku dengan menggunakan indeks harga perdagangan besar (IHPB) tanpa ekspor sebagai deflatornya, sebagai berikut:

**nilai belanja barang atas dasar harga berlaku**

***IHPB (tanpa ekspor)***

- ii. Mengekstrapolasi belanja pegawai dengan menggunakan indeks jumlah pegawai negeri sipil sebagai ekstrapolatornya yaitu:

***nilai belanja pegawai x indeks (kuantum) yang relevan***

- iii. Penyusutan diperhitungkan sebesar 5 persen dari total nilai PMTB pemerintah
- iv. Penerimaan jasa dan penerimaan penjualan barang lainnya diperoleh dengan mengalikan rasio penerimaan (ADHK) tersebut terhadap total nilai penerimaan

#### **5.3 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)**

Mencakup pengeluaran berbagai institusi seperti pemerintah, perusahaan maupun rumah tangga dalam melakukan investasi fisik (PMTB) di wilayah ekonomi domestik. Barang modal atau kapital yang digunakan di sini bersumber dari hasil produksi dalam negeri

(domestik) dan dari impor.

#### **a. Definisi Konsep**

Pembentukan modal tetap bruto diartikan sebagai pengadaan, pembuatan, maupun pembelian atas barang-barang modal dikurangi dengan penjualan barang modal bekas yang serupa pada suatu tahun tertentu. Secara tepat meliputi barang modal baru dari produksi dalam negeri maupun barang-barang modal baru maupun bekas dari luar negeri. Termasuk juga di sini pengadaan atau pembuatan barang modal serta perbaikan-perbaikan besar yang menyebabkan bertambahnya umur pemakaian barang modal atau bertambahnya kapasitas produksi barang tersebut.

Penilaian barang modal adalah harga pembelian atau harga pokok pembelian yang didalamnya juga sudah termasuk pula nilai margin perdagangan dan biaya pengangkutan, atau biaya-biaya lain yang berkaitan dengan pemindahan hak milik dalam transaksi jual beli dari barang-barang modal tersebut. Harga pembelian bisa pula berupa harga produsen ataupun harga pedagang, atau bisa pula berdasarkan kesepakatan loko gudang pembeli

Secara garis besar pembentukan modal tetap bruto ini dapat dibedakan menjadi pembentukan modal dalam bentuk bangunan (konstruksi) dan bukan bangunan; Kemudian secara rinci dibedakan menurut barang modal bangunan (tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal), mesin-mesin dan perlengkapannya, alat angkutan serta barang modal lainnya. Selain bangunan, komponen barang modal lainnya dapat dibedakan lagi menurut asal wilayah produksinya, domestik maupun luar negeri (impor)

#### **b. Metode Penghitungan dan Sumber Data**

Metode yang dipakai dalam penghitungan pembentukan modal tetap bruto adalah pendekatan arus barang (*commodity flow approach*), yaitu dengan memperhitungkan proporsi total nilai penyediaan barang modal (*supply*) yang menjadi bagian dalam proses

pembentukan modal, pada waktu yang bersamaan. Barang modal khususnya yang berbentuk mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan penyediaannya berasal dari produk dalam negeri maupun dari impor. Estimasi nilai pembentukan modal dalam bentuk bangunan (konstruksi) diperoleh dengan cara mengalikan besaran rasio tertentu terhadap nilai output sektor konstruksi (domestik) yang menjadi bagian dari pembentukan modal. Dalam prakteknya tidak semua output bangunan akan menjadi pembentukan modal, karena ada sebagian dari output tersebut yang menjadi biaya antara pada sektor-sektor ekonomi produksi lainnya (diperlakukan sebagai biaya/permintaan antara). Secara prinsip estimasi nilai pembentukan modal tetap ini dapat dilakukan melalui perhitungan atas dasar harga konstan dulu yaitu dengan teknik ekstrapolasi yang kemudian di "reflasi", atau dikalikan dengan satu indeks harga tertentu. Selain itu dapat dilakukan melalui perhitungan atas dasar harga berlaku dulu yang kemudian di "deflasi" dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

Secara umum penghitungan nilai pembentukan barang modal atas dasar harga konstan ini dilakukan dengan metode ekstrapolasi, atau mengalikan nilai (ADHK 2000) pada satu tahun tertentu dengan indeks kuantumnya. Sebagaimana pula yang dilakukan pada nilai pembentukan modal yang berupa mesin-mesin dan alat perlengkapan produksi dalam negeri yang dihitung dengan cara ekstrapolasi. Estimasi dilakukan dengan menggunakan indeks produksi tertimbang menurut kelompok jenis barang modal, yang dibedakan ke dalam klasifikasi 5 (lima) digit kode KLUI. Kemudian untuk mendapatkan nilai atas dasar harga berlaku adalah dengan mereflasi nilai ADHK 2000 tersebut dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang tertimbang, yang disesuaikan dengan kelompok jenis barang modalnya

Sementara itu pembentukan modal berupa mesin-mesin serta alat perlengkapan yang berasal dari impor, juga diperoleh dengan cara ekstrapolasi yaitu dengan menggunakan indeks kuantum barang impor sebagai ekstrapolatornya. Indeks tersebut

dihitung dengan formula:

$$IQ_t = \frac{\sum Q_t P_o}{\sum Q_{t-1} P_o} \times 100\%$$

di mana  $Iq_t$  : Indeks kuantum tahun t  
 $Q_t$  : kuantum pada tahun t  
 $Q_{t-1}$  : Kuantum pada tahun t-1  
 $P_o$  : Harga per unit pada tahun 2000

Kemudian untuk memperoleh nilai atas dasar harga berlaku pada waktu yang bersamaan, adalah dengan me"reflasi" nilai atas dasar harga konstan tersebut dengan indeks harga perdagangan besar barang impor, yang sesuai dengan kelompok jenis barang modalnya

Berbagai data yang digunakan dalam penghitungan pembentukan modal tetap bruto di antaranya diperoleh dari:

- i. Sub-direktorat Neraca Industri dan Pertanian BPS, yang berupa output bangunan (konstruksi), baik menurut harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000
- ii. Sub-direktorat Statistik Industri Besar dan Sedang BPS, yang berupa indeks produksi industri menurut 5 digit kode KLUI, baik triwulanan maupun tahunan.
- iii. Sub-direktorat Statistik Harga Perdagangan Besar BPS, yang berupa indeks harga perdagangan besar (IHPB).
- iv. Sub-direktorat Statistik Impor BPS, yang berupa data kuantum (volume) serta nilai barang impor menurut SITC.

#### 5.4 Perubahan Inventori

Data mengenai nilai perubahan inventori dalam komponen penggunaan PDB ini mencakup dua komponen yaitu perubahan nilai inventori (*changes in inventory*) dan diskrepansi statistik (*statistical discrepancy*). Perubahan nilai inventori pada seri konstan 2000 ini sudah mulai diperhitungkan secara independen, sedangkan nilai diskrepansi

diperoleh dengan cara mengurangkan total nilai PDB pada sisi sektoral (lapangan usaha) dengan total nilai PDB pada sisi penggunaan. Perbedaan statistik antara kedua sisi PDB yang terjadi dari waktu ke waktu tersebut di antaranya disebabkan oleh i) pendekatan basis pengukuran ii) lingkup atau cakupan ukuran iii) teknik estimasi iv) sumber data dan v) penetapan asumsi.

#### **a. Definisi Konsep**

Inventori diartikan sebagai persediaan berbagai jenis produk barang jadi maupun setengah jadi untuk tujuan diproses lebih lanjut (termasuk bahan baku). Inventori ini merupakan bagian dari harta lancar yang dikuasai oleh produsen, pedagang, konsumen maupun pemerintah, dan menurut konsepnya inventori ini merupakan bagian dari proses investasi. Inventori yang dikuasai oleh rumah tangga untuk keperluan konsumsi akhirnya tidak diperhitungkan di sini. Secara lebih jauh SNA mengklasifikasikan inventori sebagai i) persediaan barang yang berada pada pihak produsen untuk digunakan dalam proses produksi lebih lanjut, dijual, atau yang akan dikirimkan kepada pihak lain; ii) persediaan barang yang berasal dari pihak lain yang akan digunakan untuk konsumsi antara, atau dijual kembali tanpa mengalami proses lebih lanjut.

Dalam hal diskrepansi statistik, nilai dua pendekatan PDB akan dibandingkan. PDB dari lapangan usaha menunjukkan hasil penjumlahan nilai tambah bruto seluruh sektor ekonomi, sedangkan PDB dari sisi penggunaan menunjukkan penjumlahan seluruh komponen permintaan akhir, setelah dikurangi dengan impor. Komponen permintaan akhir tersebut meliputi pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto serta ekspor. Jadi komponen yang berstatus residual (sisaan) ini akan menjadi satu-satunya komponen dalam PDB penggunaan yang mempunyai 2 (dua) tanda, bisa positif ataupun negatif. Diskrepansi statistik akan bertanda “**positif**” apabila total nilai PDB sisi sektoral lebih besar dari total nilai

PDB dari sisi penggunaan, atau berlaku hal yang sebaliknya.

#### **b. Metode Penghitungan dan Sumber Data**

Ada dua pendekatan yang digunakan untuk menghitung inventori yaitu pendekatan komoditi dan pendekatan perusahaan (korporasi). Pendekatan komoditi (pendekatan tidak langsung) adalah dengan menghitung perubahan inventori menurut jenis komoditi terutama bagi produk yang berupa hasil perkebunan, kehutanan, peternakan dan pertambangan; Sedangkan pendekatan langsung (perusahaan) digunakan untuk menghitung perubahan inventori pada kegiatan industri pengolahan.

- **Pendekatan Komoditi**

Disebut juga pendekatan arus komoditas. Dilakukan dengan mengalikan perubahan inventori dalam volume (yang merupakan hasil pengurangan posisi pada akhir tahun tertentu dengan posisi pada akhir tahun sebelumnya) dengan harga tahun dasar untuk mendapatkan perubahan inventori atas dasar harga konstan 2000. Kemudian volume tersebut dikalikan dengan harga pada tahun yang bersangkutan untuk mendapatkan perubahan inventori atas dasar harga belaku.

- **Pendekatan Perusahaan (korporasi)**

Pendekatan perusahaan dilakukan karena data yang diperoleh dari perusahaan (baik dari hasil survey industri besar sedang maupun dari laporan keuangan perusahaan terbuka) merupakan data posisi inventori atas dasar harga pasar. Data hasil survey industri besar sedang berupa bahan baku dan mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi yang siap dipasarkan. Nilai posisi tersebut dideflasi dengan indeks harga perdagangan besar, sehingga didapatkan posisi inventori atas dasar harga konstan 2000. Dengan mengurangkan nilai posisi inventori tersebut pada tahun tertentu dengan tahun sebelumnya, akan didapat perubahan inventori atas dasar harga konstan. Untuk

mendapatkan perubahan inventori atas dasar harga berlaku dengan cara mereflasi perubahan inventori atas dasar harga konstan 2000 dengan indeks harga perdagangan besar.

Data dasar untuk penghitungan inventori ini diperoleh dari Statistik Perkebunan, Statistik Kehutanan, Statistik Pertambangan & Penggalian, Statistik Industri Besar-Sedang, Publikasi Dirjen Peternakan, dan Bursa Efek Surabaya berdasarkan laporan perusahaan-perusahaan terbuka (*Go Public*). Kemudian indeks harga yang digunakan berasal dari Statistik Harga Perdagangan Besar.

## 5.5 Ekspor dan Impor Barang serta Jasa

Merupakan aktivitas perdagangan produk barang dan jasa dengan pihak luar negeri, yang secara konsep transaksinya terjadi antara pihak “**residen**” dengan “**non-residen**”. Apabila ekspor menambah devisa maka sebaliknya impor akan mengurangi devisa negara. Dalam penghitungan PDB karena impor bukan merupakan bagian dari output domestik maka nilai impor harus dikurangkan dari PDB, yaitu dengan mengurangi total nilai PDB dengan total nilai impornya.

### a. Definisi konsep

Ekspor dan Impor merupakan kegiatan perdagangan barang dan jasa antara penduduk<sup>37</sup> Indonesia dengan penduduk negara lain. Termasuk juga dalam ekspor adalah pembelian langsung penduduk negara lain atas berbagai produk barang dan jasa di wilayah domestik, seperti halnya pembelian oleh wisatawan asing (turis). Begitu pula sebaliknya, pembelian langsung barang dan jasa di luar negeri oleh penduduk Indonesia dikategorikan

---

<sup>37</sup> Menggunakan konsep “residen”

sebagai impor. Dengan demikian maka yang dimaksud dengan ekspor dan impor di sini adalah merupakan transaksi perdagangan dengan pihak luar negeri (*eksternal transaction*) baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### **b. Metode Penghitungan dan Sumber Data**

Ekspor dan impor barang dikategorikan menurut penggolongan yang berbeda. Ekspor barang digolongkan menurut kelompok: minyak bumi dan bukan-minyak bumi, sementara impor barang menurut kelompok barang konsumsi, bahan baku, dan barang modal. Sedangkan ekspor dan impor jasa digolongkan menurut: jasa pengangkutan, jasa asuransi, jasa komunikasi, pariwisata, pemerintahan dan jasa lainnya.

Ekspor dan impor<sup>38</sup> barang dinilai menurut harga *Free on Board (FOB)*<sup>39</sup>. Nilai ekspor maupun nilai impor yang tersedia masih dalam satuan kurs dolar Amerika (\$ US), sehingga perlu dikonversikan ke dalam satuan rupiah. Untuk ekspor konversinya menggunakan rata-rata kurs “beli” dolar AS yang ditimbang dengan nilai nominal transaksi ekspor bulanan. Sedangkan impor konversinya menggunakan rata-rata kurs “jual” dolar AS yang ditimbang dengan nilai nominal transaksi impor bulanan. Hasil estimasi nilai ekspor maupun impor barang dan jasa yang telah dikonversikan dalam satuan rupiah tersebut, merupakan nilai transaksi atas dasar harga berlaku.

Untuk mendapatkan nilai atas dasar harga konstan dibedakan antara produk barang dan produk jasa. Untuk produk barang diperoleh dengan cara mendeflasi nilai atas dasar harga berlakunya dengan indeks harga per unit (IHPU) masing-masing kelompok jenis barang ekspor maupun impor. Sedangkan untuk ekspor dan impor jasa diperoleh dengan cara membagi nilai atas dasar harga berlaku dengan indeks harga per-unit barang ekspor dan barang impor yang dikombinasi dengan indeks implisit jasa-jasa yang sudah diseleksi.

---

<sup>38</sup> Konsep sebelumnya menurut harga CIF (*Cost Insurance and Freight*)

<sup>39</sup> Harga diatas kapal, tidak termasuk biaya angkut, premi asuransi dan biaya pelabuhan lainnya

Data yang dipakai untuk mengestimasi nilai ekspor dan impor selain bersumber dari BPS, juga dari Bank Indonesia (BI). Dengan demikian maka untuk nilai ekspor maupun nilai impor barang, data yang digunakan bersumber dari BPS (statistik ekspor dan impor), sedangkan ekspor dan impor jasa bersumber dari BI.

## 5.6 Penyusutan (Depresiasi)

Penyusutan adalah bagian dari biaya produksi, yang menjelaskan tentang berkurangnya nilai barang modal secara ekonomi. Penyusutan bukan merupakan faktor pendapatan sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan PDB.

### a. Definisi konsep

Penyusutan merupakan pengurangan nilai barang modal dalam suatu periode akuntansi. Pengurangan atau ausnya nilai barang modal (kapital) bisa secara ekonomis maupun teknis, akibat digunakannya dalam suatu proses produksi. Agar supaya nilai aset kembali pada posisi semula maka harus dilakukan pengembalian barang modal melalui penyisihan nilai kapital. Ausnya nilai kapital dalam proses produksi ini kemudian disebut sebagai depresiasi (*consumption of fixed capital*). Kemudian penyusutan yang merupakan tabungan perusahaan akan menjadi salah satu sumber pembiayaan investasi fisiknya.

### b. Metode Penghitungan dan Sumber Data

Penyusutan diperhitungkan terhadap nilai PMTB, atau terhadap nilai barang modal yang ada (stok kapital). Data penyusutan diperoleh dari hasil kajian survei yang menunjukkan bahwa rasio penyusutan antar jenis barang modal sangat bervariasi antara 3 sampai dengan 60 tahun. Rasio nilai penyusutan setiap tahun diasumsikan sama besar karena menggunakan proporsi yang sama antar tahunnya. Untuk itu di sini digunakan rata-

rata penyusutan sekitar 5 persen dari total nilai PDB. Secara umum perhitungan penyusutan pada perusahaan di Indonesia menggunakan metode “garis lurus” atau dengan mengikuti pola dan struktur barang modal pada masing-masing tahun, Meski secara empiris penyusutan ini sangat dipengaruhi oleh faktor “usia” serta “usai” pemakaian barang modalnya masing-masing.

### **5.7 Pajak Tidak Langsung (*neto*)**

Pajak merupakan pembayaran kewajiban perusahaan maupun rumah tangga (masyarakat) kepada pemerintah disatu sisi, sedangkan pada sisi yang lain akan menjadi bagian dari penerimaan pemerintah Yang dicakup dalam perangkat PDB hanya pajak tidak langsung dan subsidi (*current transaction*), sedangkan pajak langsung akan dicakup pada komponen yang lain. *Pajak tidak langsung neto* adalah pajak tidak langsung dikurangi subsidi.

#### **a. Definisi konsep**

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap barang dan jasa yang diproduksi oleh unit usaha<sup>40</sup>, yang secara tidak langsung pajak tersebut dibebankan kepada konsumen melalui harga produk yang dijualnya (dibeli oleh konsumen). Pajak tidak langsung dan subsidi merupakan unsur yang mempunyai transaksi berlawanan. Pajak tidak langsung merupakan penerimaan pemerintah dari masyarakat, sedangkan subsidi merupakan bantuan (transfer) yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

#### **b. Metode penghitungan dan sumber data**

Informasi mengenai pajak tidak langsung diperoleh dari laporan penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

---

<sup>40</sup> Secara langsung pajak tersebut dibayarkan oleh perusahaan

## 5.8 Pendapatan atas Faktor Produksi dari Luar Negeri

Merupakan sumber atau bagian dari komponen pendapatan masyarakat domestik, yang secara spesifik menggambarkan tentang aliran transaksi dalam bentuk pendapatan faktorial dari luar negeri ke dalam negeri dan/atau sebaliknya. Pendapatan faktor produksi merupakan pendapatan yang ditimbulkan karena adanya kepemilikan faktor-faktor produksi suatu negara, seperti tanah (*land*), modal (*capital*), tenaga kerja (*labor*), serta manajemen (*entrepreneur*). Faktor produksi tersebut digunakan oleh wilayah/negara lain (non-residen) sehingga menimbulkan aliran devisa ke dalam negeri. *Pendapatan neto atas faktor produksi terhadap luar negeri* merupakan selisih pendapatan atas faktor produksi dari luar wilayah domestik yang faktornya dimiliki oleh Indonesia dikurangi dengan pendapatan atas faktor produksi yang berada di wilayah domestik yang faktornya dimiliki oleh luar negeri (non-residen).

### a. Definisi konsep

Yang dimaksud dengan pendapatan di sini adalah penerimaan atau balas jasa faktor produksi tenaga kerja maupun bukan tenaga kerja (modal/kapital) serta faktor atau harta atas kepemilikan lainnya. Pendapatan dari faktor produksi tenaga kerja berupa kompensasi atau balas jasa faktor produksi tenaga kerja berupa upah dan gaji, serta tunjangan-tunjangan lainnya. Sedangkan pendapatan faktor produksi bukan-tenaga kerja mencakup kompensasi dalam bentuk bunga, deviden, royalti, dan sejenisnya. Transaksi tersebut sering diartikan juga sebagai pendapatan dari investasi yang ditanamkan. Dengan demikian maka *pendapatan neto atas faktor produksi terhadap luar negeri* merupakan selisih pendapatan atas faktor produksi dari luar wilayah domestik (yang faktor produksinya dimiliki oleh Indonesia) dikurangi dengan pendapatan atas faktor produksi yang berada di wilayah domestik (yang faktor produksinya dimiliki oleh luar negeri/non-residen).

## **b. Metode Penghitungan dan Sumber Data**

Nilai pendapatan “neto” terhadap luar negeri atas faktor produksi tenaga kerja maupun bukan-tenagakerja diperoleh dari neraca pembayaran luar negeri (*Balance of Payment*) yang bersumber dari Bank Indonesia. Data asli yang diperoleh masih dalam satuan nilai dolar Amerika (\$ US), sehingga harus dikonversikan ke dalam nilai rupiah dengan menggunakan kurs nilai ekspor dan nilai impor rata-rata tertimbang. Untuk pendapatan faktor produksi yang berasal dari luar negeri dikonversi dengan menggunakan kurs ekspor sedangkan untuk pendapatan faktor produksi ke luar negeri dikonversikan dengan menggunakan kurs impor. Nilai hasil perhitungan tersebut merupakan estimasi berdasarkan harga berlaku. Perkiraan atas dasar harga konstan dilakukan dengan cara deflasi, yaitu dengan membagi estimasi atas dasar harga berlaku dengan indeks harga yang sesuai, yaitu indeks harga per-unit impor dan indeks harga per-unit ekspor masing-masing sebagai deflatornya.

## **5.9 Transfer Berjalan (*Current Transfer*)**

Merupakan komponen yang akan menjadi koreksi bagi nilai PDB maupun Pendapatan Nasional, yang sifatnya bisa menambah atau bisa pula mengurangi. Untuk memperoleh pendapatan disposabel maka pendapatan nasional harus dikurangi dengan transfer berjalan.

### **a. Definisi Konsep**

Transfer merupakan proses pendistribusian (pengalokasian) kembali pendapatan faktor yang dimiliki oleh berbagai institusi kepada pihak lain secara cuma-cuma, tanpa adanya suatu ikatan. Dapat pula diartikan sebagai pemberian yang bersifat tidak wajib sebagai suatu proses redistribusi pendapatan masyarakat karena dilatar belakangi oleh alasan sosial. Transfer yang dimaksud di sini adalah transfer berjalan (*current transfer*) biasanya

berupa pemberian hibah dalam bentuk sumbangan untuk bencana alam, sumbangan pendidikan, sumbangan kesehatan dan sejenisnya.

**b. Metode Penghitungan dan Sumber data**

Nilai transfer “*neto*” terhadap luar negeri diperoleh dari neraca pembayaran luar negeri (*Balance of Payment*) yang bersumber dari Bank Indonesia. Data asli yang diperoleh masih dalam satuan nilai dolar Amerika (US\$), sehingga harus dikonversikan ke dalam nilai rupiah dengan menggunakan kurs nilai ekspor dan nilai impor rata-rata tertimbang. Untuk penerimaan transfer yang berasal dari luar negeri dikonversi dengan menggunakan kurs ekspor, sedangkan untuk pembayaran transfer ke luar negeri dikonversikan dengan menggunakan kurs impor. Nilai hasil estimasi tersebut merupakan perkiraan atas dasar harga berlaku.

<https://www.bps.go.id>

***Halaman ini dibiarkan kosong***

## **BAB VI P E N U T U P**

1. Berdasarkan data PDB menurut penggunaan dapat dipelajari struktur dan kondisi ekonomi Indonesia, antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2007. Analisis yang disajikan disini agak sedikit berbeda dengan sisi lapangan usaha (sektoral) yang lebih memfokuskan pada perilaku produksi. PDB penggunaan akhir disini lebih menekankan pada perilaku konsumsi akhir, investasi (fisik) dan perdagangan internasional. Tiga segmen pelaku ekonomi yang ditampilkan dalam pengukuran PDB menurut penggunaan akhir ini adalah rumah tangga (termasuk lembaga nirlaba yang melayani rumah tangga), pemerintah dan sektor bisnis (dalam perilaku investasinya).
2. Pada publikasi ini disajikan beberapa analisis sederhana yang dapat diturunkan dari data PDB, khususnya menurut penggunaan. Dengan menggunakan komponen-komponen yang membentuk PDB yang dilengkapi dengan parameter sosial demografi lainnya (penduduk, rumah tangga, serta pegawai pemerintah) menyebabkan analisis yang diturunkan diharapkan menjadi lebih informatif.
3. Data disajikan dalam bentuk satu kurun waktu sehingga mudah untuk digambarkan perubahan-perubahan atau tren yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (Rupiah, indeks, persentase, rasio, unit) sesuai dengan tujuan analisis dan sesuai pula dengan sifat atau karakteristik masing-masing data.
4. Sebagian data yang diturunkan melalui perangkat data PDB menurut penggunaan dapat dijadikan rujukan bagi pengembangan serta perluasan indikator ekonomi makro lainnya seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model-model ekonomi sederhana yang

berkaitan antara seluruh variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan perangkat data makro lainnya seperti PDB menurut lapangan usaha (sektoral), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan neraca arus dana.

5. Sebagian dari interaksi transaksi dengan luar negeri (*external account*) secara agregat disajikan pula disini seperti halnya ekspor dan impor, pendapatan faktorial (*factorial income*) neto dan transfer berjalan (*current tranfer*) neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap ekonomi negara lain (*Rest of the World*).

## DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. \_\_\_\_\_, *Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri, 1980—1990*, Jakarta.
3. \_\_\_\_\_, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
4. \_\_\_\_\_, *Statistik Industri, berbagai seri*, Jakarta.
5. \_\_\_\_\_, *Statistik Listrik, Gas dan Air*, berbagai seri, Jakarta.
6. \_\_\_\_\_, *Statistik Pertambangan Migas*, berbagai seri, Jakarta.
7. \_\_\_\_\_, *Statistik Pertambangan Non Migas*, berbagai seri, Jakarta.
8. \_\_\_\_\_, *Statistik Konstruksi*, berbagai seri, Jakarta.
9. \_\_\_\_\_, *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
10. \_\_\_\_\_, *Statistik Keuangan BUMN dan BUMD, 1997*, Jakarta 2000.
11. \_\_\_\_\_, *Profil Ekonomi Rumahtangga 1998*, Jakarta 1999.
12. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stock?*, Netherlands, 1992.
13. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
14. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
15. United Nations, *A System of National Accounts*, Studies in Methods, Series F No.2 Rev.3, New York, 1968.
16. \_\_\_\_\_, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.

17. \_\_\_\_\_, *Handbook of National Accounting for Production, Sources and Methods*, Series F No. 39, New York, 1986.
18. \_\_\_\_\_, *Handbook of National Accounting, Public Sector Accounts, Studies Methods*, Series F No. 50, New York, 1988.
19. \_\_\_\_\_, *Link between Business Accounting and National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 76, New York, 2000.
20. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
21. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.
22. World Bank, *System of National Accounts 1993*, Bahan Kursus, Washington DC, 1993

## **Lampiran-Lampiran**

<https://www.bps.go.id>